VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1 Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Petani Mengalih Fungsikan Lahan Pertanian

Mega proyek Bandara Internasional Jawa Barat merupakan salah satu langkah terobosan baru yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat guna menjadikan Jawa Barat menjadi Provinsi dengan tingkat perekonomian tinggi seiring dengan adanya fasilitas transportasi yang memadai untuk menunjung kegiatan-kegiatan perdagangan dan pariwisata nantinya.

Kita tahu bahwa di Kecamatan Kertajati Kab. Majalengka terdiri dari 14 desa yaitu: Desa Kertajati, Desa Bantarjati, Desa Babakan, Desa Sukawana, Desa Kertawinangun, Desa Pakubeureum, Desa Pasiripis, Desa Sukakerta, Desa Kertasari, Desa Mekarmulya, Desa Mekarjaya, Desa Palasah, Desa Syahbandar, dan terakhir Desa Sukamulya yang hingga saat ini belum ada kesepakan untuk pembebasan lahan antara pemerintah dan masyarakat Desa.

Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) merupakan salah satu penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian, wacana pembangunan bandara tersebut sudah digulirkan sejak tahun 2002 silam. Namun jauh sebelum itu semua, masyarakat terdahulu yang tinggal di daerah proyek pembangunan tersebut mengatakan jika pada masa mendatang lahan pertanian di daerah kertajati akan tergusur seiring tingginya tingkat pembangunan dan kebutuhan yang ada di Indonesia. Kertajati Aerocity selanjutnya diimplementasikan oleh Gubernur Danny setiawan melalui suatu proses diskusi dengan INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia) dan Kadin Jawa Barat, pada tahun 2003.

Untuk lebih mengenalkan perencanaan, maka dilakukan langkah studi kelayakan BIJB oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, yang pendanaannya melalui APBD Provinsi tahun 2003 sebesar Rp.1,827 Milyar. Study kelayakan dilakukan dengan pengamatan di 421 titik, dan sembilan bandar eksisting yang menghasilkan tiga lokasi alternatif calon bandara internasional. Kemudian, berdasarkan hasil pengkajian teknis, lokasi BIJB ditetapkan di Desa Palasah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka. Penetapan lokasi tersebut, kemudian dikukuh dan diusulkan melalui Surat Gubernur Nomor 553.2/2271/Dalprog, tertanggal 29 Juli 2004 kepada Menteri Perhubungan RI.

Disusul Surat Gubernur No. 553.2/2272/Dalprog/2004 ditujukan kepada Menko Perekonomian selaku Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN).

Dari surat usulan Gubernur tersebut, maka lahirlah penetapan lokasi BIJB, melalui Keputusan Menteri perhubungan No. KM 34/2005 tertanggal 17 Mei 2005.Kemudian ditingkat Kabupaten, Bupati Majalengka menetapkannya melalui suratKeputusan Bupati majalengka No. 16 tahun 2006.Setelah melalui langkah-langkah penetapan, maka pihak Dinas Perhubungan Provinsi membuat Master Plan BIJB di Kabupaten Majalengka dengan Peraturan Menteri perhubungan No. KM 5 tahun 2007. Sedangkan mengenai amdal, pihak Dinas Perhubungan telah pula melakukannya yaitu pada tahun 2006, dan kini sudah ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup (Kesbang Sukamulya, 2015).

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai awal mula terjadinya alih fungsi lahan di Kertajati berkenaan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam prosesnya alih fungsi lahan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, dimana faktor-faktor yang ada di dalamnya merupakan faktor yang dapat mempengaruhi petani untuk beralih fungsi lahan.Dimulai dengan faktor internal yang terdiri dari kriteria tingkat pendidikan petani, tingkat pendapatan petani, dan tanggunggan keluarga petani. Lalu adapun faktor eksternal yang mempengaruhi petani beralih fungsi lahan lebih kepada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, berkenaan dengan harga tanah serta tuntutan pembangunan dimana adanya pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) bermula dari kebutuhan sarana dan prasarana transportasi.

6.1.1 Faktor Internal yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan

Pada bagian ini yang melatarbelakangi petani menjual lahan pertanian untuk dibangun dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal sendiri merupakan faktor yang berasal dari permasalahan yang muncul dari dalam petani sendiri. Berikut ini merupakan deskripsi responden berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan tanggunggan keluarga terhadap luas lahan:

1. Pendidikan

Kondisi pendidikan di Desa Sukamulya merupakan salah satu faktor yang mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Desa akan tetapi, sarana pendidikan

disana cukup terbatas dan mayoritas masyarakat hanya menempuh pendidikan hingga tingkat SD (Sekolah Dasar). Fasilitas pendidikan yang ada di Sukamulya terdiri dari 1 bangunan TK, 2 PAUD, dan 3 SD. Sisanya seperti SLTP dan SLTA tidak terdapat disana sehingga memaksa masyarakat yang ingin menempuh mendidikan yang lebih tinggi harus menyekolahkan anak-anaknya diluar Desa Sukamulya, beberapa diantara menjadi santri di daerah lain. Kondisi pendidikan yang rendah tidak mempengaruhi masyarakat untuk memperkenalkan pertanian sejak dini kepada anak-anaknya, masyarakat Desa Sukamulya sudah terbiasa membawa anak-anaknya untuk ikut membantu di ladang saat libur sekolah. Terlihat sekali jika Desa Sukamulya merupakan Desa yang kaya akan sumber pertanian, dengan sudah memperkenalkan pertanian sejak dini kepada anak-anaknya.

Pendidikan di Desa Sukamulya bukanlah suatu prioritas utama yang harus dicapai setinggi mungkin, bukan berarti tidak ingin menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, melainkan sarana pendidikan untuk mencapai jenjang yang lebih tinggi cukup sulit. Selain itu, faktor pendapatan yang diperoleh dari hasil bertani sudah cukup besar sehingga kebanyakan orang tua memperkenalkan pertanian sedini mungkin agar kelak pertanian di keluarganya masing-masing dapat dikelola oleh anaknya. Tidak hanya pendapatan dari pertanian yang cukup besar melainkan cukup menjadi buruh tani, jika bekerja setengah hari sudah mendapat imbalan Rp.75.000,-. Wajar jika kebanyakan masyarakat yang berpendidikan tinggi sangat sedikit, jikapun ada yang berpendidikan tinggi atau memperoleh gelar S1 kebanyakan dari mereka tidak menetap lagi de Desa Sukamulya melainkan mencari lapangan pekerjaan baru yang sesuai dengan tingkat pendidikan yang dicapai. Tidak heran jika sedikit sekali masyarakat yang berpendidikan tinggi namun memiliki lahan yang minim. Tingginya pendapatan dari hasil pertanian mendorong masyarakat Desa Sukamulya untuk tetap bertani meskipun berpendidikan tinggi, karena bagi masyarakat Desa Sukamulya pertanian sudah menjadi suatu pekerjaan yang dipandang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Berikut tabel komposisi responden berdasarkan tingkat pendidikan terhadap luas lahan:

Tabel 13. Hubungan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden Terhadap Luas Kepemilikan Lahan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Luas Pemilikan Lahan (%)			Presentase (%)	Ranking
			R	S	T		
1	Tidak Tamat	3	15,00	-	-	15,00	IV
2	SD / sederajat	6	20,00	-	10,00	30,00	I
3	SLTP / sederajat	6	25,00	5,00	-	30,00	II
4	SLTA / sederajat	3	10,00	-	5,00	15,00	III
5	Diploma/Sarjana	2	5,00	-	5,00	10,00	V
Total		20	75,00	5,00	20,00	100,00	Rendah

Sumber : Data Sekunder RPJMDES (2014)

Keterangan : R = Rendah 0,33ha, S = Sedang 0,33-0,77ha, T = Tinggi >0,77 ha

Berdasarkan tabel di atas yang diperoleh dari responden di lapang, tingkat pendidikan responden cukup beragam. Akan tetapi, mayoritas responden hanya menyelesaikan tingkat pendidikan hingga SD serta SMP masing-masing sebesar 30% sedangan 60% sisanya diisi oleh petani yang tidak tamat sekolah, SLTA, serta terakhir hanya 10% responden yang berpendidikan hingga strata 1 atau sarjana.

Jika dihubungkan terhadap luas lahan yang dimiliki petani berdasarkan tingkat pendidikan, tidaklah cukup tingkat pendidikan mempengaruhi luas lahan yang dimiliki petani. Seperti halnya hasil pada tabel justru yang memiliki lahan dengan luas lebih dari 0,77ha 10% lulusan SD, sedangkan SLTA dan Kejuruan masing-masing 5% atau 1 petani. Sedangkan luas lahan yang dimiliki petani berkisar antara 0,33-0,77 justru berada pada tingkat pendidikan SLTP dengan hanya 5% sisanya pada luas lahan kurang dari 0,33ha, 25% SLTP, 20% SD, SLTA 10% dan terakhir kejuruan 5%. Tidak nampaknya pengaruh tingkat pendidikan terhadap luas lahan dikarenakan ada beberapa petani atau responden dengan pendidikan rendah akan tetapi mempunyai lahan luas dikarenakan hasil warisan orang tuanya. Sehingga faktor pendidikan tidak dapat dijadikan patokan untuk menilai besarnya luas lahan petani akibat dari tingginya tingkat pendidikan petani.

2. Pendapatan

Faktor pendapatan dilihat dari tingkat pendapatan terhadap luas kepemilikan lahan responden adalah suatu deskripsi yang digunakan untuk mengetahui tingkat pendapatan responden terhadap luasan lahan yang dimiliki responden berdasarkan kriteria luas lahan yang ada. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengelompokkan mengenai banyaknya petani yang memiliki lahan berdasarkan luasan tertentu serta dikaitkan dengan kondisi ekonomi setelah alih fungsi lahan. Kondisi lapang yang ada di Desa Sukamulya mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani, dengan tingkat pendapatan yang berbeda-beda. Hal yang membedakan diantara masyarakat adalah adanya pendapatan yang diperoleh tidak hanya berprofesi sebagai petani saja melainkan ada pekerjaan sampingan lainnya. Berikut tabel komposisi responden berdasarkan luas lahan :

Tabel 14. Hubungan Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan Terhadap Luas Kepemilikan lahan

No	Tingkat Pendapatan	Jumlah (orang)	Luas Kepemilikan Lahan (%)			Presentase (%)	Ranking
			R	S	T		
1.	<1 jt	15	25,00	15,00	35,00	75,00	I
2.	1 – 1,5 jt	1	-	-	5,00	5,00	III
3.	>1,5 jt	4	10,00	5,00	5,00	20,00	II
Total		20	35,00	20,00	45,00	100,00	Tinggi

Sumber : Data Sekunder RPJMDES (2014)

Keterangan : R = Rendah 0,33ha, S = Sedang 0,33-0,77ha, T = Tinggi >0,77 ha

Desa Sukamulya merupakan desa yang maju dikarenakan sistem dan penghasilan pertaniannya cukup tinggi. Berdasarkan data luas lahan responden yang diperoleh mayoritas luas lahan responden 75% kurang dari 0,33ha, dari total 75% responden yang memiliki luas lahan kurang dari 0,33ha 35% diantaranya adalah petani dengan tingkat pendapatan lebih tinggi sebelum adanya alih fungsi lahan sedangkan 25% yakni petani yang memperoleh penghasilan rendah, serta 15% lainnya petani yang merasa adanya alih fungsi lahan ataupun tidak, tidak akan terlalu berpengaruh terhadap tingkat pendapatannya. Dengan hasil tersebut kategori ini termasuk paling dominan sehingga berada pada peringkat satu.

Selanjutnya berada di kisaran 0,33ha sampai dengan 0,77ha menempati peringkat ketiga atau terendah hanya memperoleh 5% dari total 100% atau 20 responden yang ada, 5% tersebut merupakan responden yang merasa jika sebelum adanya alih fungsi lahan dengan luas lahan yang dimilikinya kini akan lebih tinggi pendapatannya dibanding dengan adanya alih fungsi lahan untuk pembangunan bandara nantinya.

Responden yang memiliki lahan pertanian dan rumah kurang dari 0,33ha merupakan petani yang dulunya berasal dari desa lain dan pindah menetap di Desa Sukamulya, sedangkan petani yang memiliki lahan dikisaran 0,33 hingga 0,77ha atau lebih daripada itu merupakan petani yang berasal dari Desa Sukamulyanya asli. Hanya saja petani tersebut sudah menjual lahannya sebagian kepada pemerintah.

Secara ekonomi pun petani yang memiliki lahan kurang dari 0,33ha merupakan petani dengan tingkat penghasilan yang cukup dan terkadang berprofesi sebagai buruh tani atau bekerja diluar bidang pertanian. Sedangkan petani yang memiliki luas lahan yang cukup besar merupakan petani tuan tanah besar atau petani yang pada dasarnya memiliki pekerjaan utama diluar bidang pertanian seperti PNS, percetakan, dan wirausaha.

Dapat disimpulkan dari penjelasan data di atas bahwa luas kepemilikan lahan yang dimiliki petani tidaklah berpengaruh terhadap tingkat pendapatan petani. Hal ini, dikarenakan ada beberapa petani yang memiliki luas lahan rendah tidak hanya berprofesi sebagai petani atau butuh tani saja melainkan ada pekerjaan lainnya disamping pertanian. Namun ada juga petani dengan luas lahan yang cukup besar akan tetapi berpenghasilan rendah, karena hanya bergantung pada hasil pertanian sebelumnya saja.

3. Tanggunggan Keluarga

Pada Faktor tanggunggan keluarga merupakan suatu deskripsi yang menghubungkan tanggunggan keluarga petani responden dihadapkan pada luas lahan yang dimiliki petani itu sendiri. Fungsi dari adanya pengelompokkan seperti ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh jumlah tanggunggan keluarga sama dengan luas lahan yang dimiliki oleh petani. Dengan diketahuinya pengaruh tersebut akan mempermudah peneliti mengetahui sejauh mana dampak perubahan

luas lahan setelah adanya alih fungsi lahan dengan tanggunggan keluarga yang dimiliki.

Jika melihat kondisi lapang yang ada di Desa Sukamulya berdasarkan jumlah tanggunggan keluarga dari total 20 responden yang ada mayoritas responden hanya memiliki tanggungan keluarga kurang dari sama dengan 2 sebanyak 11 kepala keluarga sedangkan sisanya sebanyak 8 kepala keluarga dengan jumlah tanggunggan keluarga berkisar antara 3-4 jiwa, terakhir dengan jumlah tanggunggan keluarga lebih dari 4 jiwa hanya sebanyak 1 kepala keluarga. Melihat tanggunggan keluarga yang ada menunjukkan jika Desa Sukamulya bukanlah termasuk salah satu desa yang memiliki jumlah tanggungan keluarga berlebih, kebanyakan masyarakat asli atau bukan berpindah dari desa lain yang terkena dampak dari adanya alih fungsi lahan akibat pembanguna BIJB termasuk ke dalam masyarakat yang sudah melaksanakan adanya program KB (Keluarga Berencana). Semakin banyak jumlah tanggungan kelurga yang dimiliki semakin banyak juga beban yang ada pada masing-masing kepala keluarga, karena setiap dari mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk bisa memberikan lahan yang tidak banyak untuk dibagi dalam luasan yang lebih kecil lagi agar semua anak-anaknya dapat memperoleh bagiannya masing-masing. Seiring berjalannya waktu masyarakat Desa Sukamulya tidak hanya saja mengelola lahan miliknya melainkan banyak juga anak-anak mereka yang belum berkeluarga bekerja sebagai buruh tani dengan mengelola lahan-lahan milik perusahaan pabrik gula atau bekerja pada tuan tanah besar.

Berikut tabel komposisi responden berdasarkan tanggunggan keluarga:

Tabel 15. Hubungan Berdasarkan Tanggunggan Keluarga Responden Terhadap Luas Kepemilikan Lahan

No	Jumlah Tanggungan Keluarga	Jumlah (Jiwa)	Luas Kepemilikan Lahan (%)			Presentase (%)	Ranking
			R	S	T		
1.	≤2	11	45,00	-	10,00	55,00	I
2.	3-4	8	30,00	5,00	5,00	40,00	II
3.	>4	1	-	-	5,00	5,00	III
Total		20	75,00	5,00	20,00	100,00	Rendah

Sumber : Data Sekunder RPJMDES (2014)

Keterangan : R = Rendah (0,33), S = Sedang (0,33-0,77), T = Tinggi (>0,77)

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel di atas diperoleh data petani berdasarkan tanggunggan pekerjaannya. Dimana sebanyak 55% atau sebanyak 11 jiwa mayoritas petani memiliki 2 tanggunggan keluarga yang terdiri dari istri dan anak 1. Adapun yang lainnya ada di kriteria 2 yakni sebanyak 3-4 orang keluarga dengan jumlah sebanyak 8 jiwa dan persentase sebesar 40%, sedangkan sisanya lebih dari 4 orang hanya 5% atau 1 petani responden saja.

Jika jumlah tanggunggan keluarga tersebut dibandingkan terhadap luas lahan yang dimiliki oleh kepala keluarga yang memiliki jumlah tanggunggan keluarga tersebut dapat dilihat jika jumlah tanggungan tidak mempengaruhi luas lahan yang dimiliki oleh petani, berdasarkan data di atas luas lahan yang rendah atau <0,33ha terdapat 9 kepala keluarga dengan jumlah tanggungan ≤2 dan dengan jumlah tersebut juga terdapat petani yang memiliki lahan lebih dari 1ha. Selain itu, untuk petani yang memiliki tanggunggan keluarga berkisar antara 3-4 ada 6 kepala keluarga dengan luas lahan rendah dan masing-masing 1 petani dengan luas lahan sedang dan tinggi. Adapun untuk petani yang memiliki tanggunggan keluarga lebih dari 4 justru hanya ada 1 petani dan ia memiliki luas lahan lebih dari 1ha. Terlihat berdasarkan interpretasi data di atas jika jumlah tanggungan keluarga petani tidak mempengaruhi petani untuk memiliki lahan yang sempit atau luas, adapun faktor lainnya lebih dakarenakan lahan hasil dari harta warisan keluarganya.

6.1.2 Tingkat Persetujuan Responden Terhadap Faktor Internal Alih Fungsi Lahan

Tingkat persetujuan responden terhadap faktor internal alih fungsi lahan untuk mengetahui tingginya antusias petani dalam menentukan faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan. Dengan demikian diketahuinya deskripsi responden jika dihubungkan dengan tingkat persetujuan responden terhadap tingkat persetujuan untuk beralih fungsi lahan secara keseluruhan akan dapat diperoleh faktor mana yang memberikan dampak pengaruh yang cukup besar dengan tingkat persetujuan yang cukup tinggi dari responden. Berikut ini merupakan hasil tingkat persetujuan responden terhadap faktor internal yang mempengaruhi alih fungsi lahan:

Tabel 16. Faktor Internal yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan

No	Faktor Internal	Jumlah (orang)	Tingkat Persetujuan (%)			Presentase tertinggi (%)	Ranking
			TS	S	SS		
1.	Pendidikan	20	-	15,00	85,00	85,00	I
	a. Tidak tamat	3			15,00		
	b. SD	6			30,00		
	c. SMP	6			30,00		
	d. SMA	3		5,00	10,00		
	e. Diploma	2		10,00			
2.	Pendapatan	20	-	25,00	75,00	75,00	II
	a. Rendah	7			35,00		
	b. Sedang	4			20,00		
	c. Tinggi	9		25,00	20,00		
3.	Tanggungga n keluarga	20	-	40,00	60,00	60,00	III
	a. ≤2	11		30,00	25,00		
	b. 3-4	8	-	10,00	30,00		
	c. >4	1	-	-	5,00		
Total		20	-	27,00	73,00	100,00	SS

Sumber: Analisis Data Primer, 2015

Keterangan : TS = Tidak setuju, S = Setuju, T = Sangat setuju

Berdasarkan hasil peringkat tabel di atas terlihat jelas bahwa faktor pendidikan sangatlah memberi pengaruh besar terhadap terjadinya alih fungsi lahan yang ada di Desa Sukamulya, dilihat dari persentase tersebut sebesar 85% responden mayoritas berpendidikan SD dan SMP masing-masing sebesar 30% mengatakan bahwa faktor pendidikan sangatlah berpengaruh terhadap pengambilan keputusannya, ini menandakan jika masyarakat sangat setuju jika pendidikan menjadi pengaruh penting dalam menentukan keputusan untuk alih fungsi lahan. Sedangkan 15% sisanya masyarakat mengatakan setuju jika pendidikan cukup berpengaruh terhadap penentuan alih fungsi lahan dan tidak ada satupun responden mengatakan tidak setuju atau tidak memberikan pengaruh sama sekali. Jelaslah internal faktor yang paling dominan mendorong petani untuk beralih fungsi lahan adalah dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan petani yang ada di Desa Sukamulya Kec. Kertajati Kab. Majalengka. Kebanyakan petani pasrah begitu saja dengan adanya informasi pengalih fungsian lahan yang disampaikan pihak terkait, sehingga tanpa berfikir panjang petani langsung

mengiyakan tanahnya dijual tanpa ada kesepakatan bersama. Di bawah ini merupakan hasil wawancara saya dengan bapak Rush (36) :

> *"...Seeur na mah masyarakat teh asal ngajual tanah na wae ka desa teu pake nanya sabaraha hargana lantaran ku pendidikan nu rendah jadi wae teu ngarti urusan meuli atawa ngajual tanah teh. Nya aya si ngajual tanah na ku pedah kurang panghasilana tapi teu loba, lamun lantaran pajak tanah mah teu aya. Salain eta, nuju basa patani ngajual tanah teh da burit sampekeun tengah peuting. Jadi sakapeung mah rada kapaksa jeung ngarasa kanbuburu lantaran ngantri ongkoh. Ari ceuk urang mah ngahaja Pamarintah Desa ngalakukeun memeh peuting teh..."*

> *"...Kebanyakan masyarakat asal menjual tanahnya ke pihak desa dikarenakan latar pendidikannya rendah jadi tidak mengerti harga jual tanah. Ada juga beberapa yang mengerti urusan jual beli tanah karena kurang penghasilannya. Jika dikarenakan pajak tidak ada.Selain itu, petani menjual tanah menjelang malam.Jadi seperti terpaksa dan terburu-buru dikarenakan ngantri juga. Menurut saya sengaja pemerintah desa melaksanakan pembayaran tanah malam hari..."*

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa petani menjual tanahnya dikarenakan faktor pendidikan sehingga tidak mengerti terkait urusan hak jual beli tanah, adapun beberapa yang karena pendapatan disebabkan secara pendidikan atau pengetahuan paham terkait urusan jual beli tanah, sehingga terkadang ada petani yang mengerti mendapatkan bagian yang justru lebih besar.

Adapun faktor pendapatan dari total 20 responden yang ada paling dominan petani mengatakan sangat setuju jika faktor pendapatan sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan petani untuk beralih fungsi lahan dimana persentase diperoleh sebesar 75% berbanding 25% petani yang mengatakan setuju jika faktor pendapatan cukup berpengaruh dalam pengambilan keputusannya. Hal ini dikarenakan banyak petani yang beranggapan jika keinginan untuk menjual lahannya bergantung pada pendapatan yang diperoleh pada saat itu. Sedangkan faktor terakhir yakni berdasarkan jumlah tanggunggan keluarga yang dimiliki masyarakat tetaplah dominan jika masyarakat yang memutuskan untuk beralih fungsi lahan karena mereka butuh dana untuk dapat menghidupi keluarganya dimana masyarakat sangat setuju jika faktor ini merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi alih fungsi lahan diperoleh persentase sebesar 30% untuk keluarga dengan tanggunggan keluarga 3-4 orang

dan 30% setuju dengan tanggunggan keluarga ≤2. Sedangkan persentase terkecil terdapat pada masyarakat yang memiliki tanggungan keluarga ≥ 4.

Dapat kita simpulkan jika faktor internal yang sangat mempengaruhi masyarakat untuk menentukan alih fungsi lahannya adalah faktor pendidikan, lalu pendapatan dan terakhir tanggunggan keluarga. Jika ditotal semuanya masyarakat mengatakan sangat setuju jika ketiga faktor tersebut memberikan pengaruh yang dominan dengan persentase sebesar 73% sedangkan sisanya 27% setuju. Berarti tidak ada satupun masyarakat dari 20 responden yang mengatakan tidak setuju jika ketiga faktor tersebut tidak mempengaruhi alih fungsi lahan.

6.1.3 Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan

Pada bagian ini yakni faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk beralih fungsi lahan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan yakni kebijakan pemerintah dimana pada faktor ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar masyarakat menyetujui jika kebijakan-kebijakan pemerintah mempengaruhi masyarakay untuk alih fungsi lahan. Selain itu, 2 faktor lainnya yakni harga tanah dimana harga tanah dimasukkan untuk mengetahui apakah masyarakat menerima atau mau menjual lahannya dengan harga yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Terakhir, tuntutan pembangunan yang merupakan perlu tidaknya terjadi alih fungsi lahan di Desa Sukamulya karena memang perlu pembangunan bandara untuk memenuhi kebutuhan fasilitas transportasi di Jawa Barat. Dengan adanya ketiga faktor tersebut dapat diketahui faktor eksternal mana yang paling besar memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk memutuskan menjual lahannya kepada pemerintah. Berikut ini penjelasan dari masing-masing faktor:

1. Kebijakan Pemerintah

Pada bagian awal faktor eksternal yang mempengaruhi alih fungsi lahan yakni lebih mengarah kepada kebijakan pemerintah, dimana kebijakan pemerintah merupakan salah satu faktor yang memberikan dorongan cukup besar terhadap pengambilan keputusan alih fungsi lahan respoden. Karena, responden sudah memiliki pandangan jika kebijakan pemerintah merupakan suatu kebijakan yang sudah tidak bisa diganggu gugat meskipun ada proses musyawarah dengan

masyarakat. Musyawarah mufakat yang dilakukan pemerintah dengan masyarakat hanya sebatas informasi bukan berupa pengumpulan saran dimana kebijakan yang telah dibuat masih dapat diubah. Ada 3 bagian yang termasuk dalam kebijakan pemerintah yakni UU alih fungsi lahan, petunjuk pelaksanaan, sistem pembangunan. Untuk UU alih fungsi lahan merupakan suatu kebijakan berupa peraturan yang telah dibubukan dalam suatu Undang-undang berisi tentang adanya peraturan mengenai alih fungsi lahan. Selanjutnya pada bagian petunjuk pelaksanaan merupakan salah satu keputusan pemerintah yang dibuat berkenaan dengan arahan berupa petunjuk peaksanaan pembangunan bandara.

Sedangkan bagian terakhir dari adanya kebijakan pemerintah adalah sistem pembangunan merupakan tata kelola atau tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pembangunan bandara, dimana pada sistem pembangunan yang dibuat akan menentukkan lamanya suatu proses pembangunan yang dilakukan. Berikut ini merupakan tingkat pengaruh kebijakan pemerintah terhadap alih fungsi lahan :

Tabel 17.Deskripsi Faktor Eksternal Berdasarkan Kebijakan Pemerintah

No.	Kebijakan Pemerintah	Jumlah (orang)	Tingkat Persetujuan (%)			Presentase (%)	Ranking
			TS	S	SS		
1	UU alih fungsi lahan	5	-	-	25,00	25,00	II
2	Petunjuk pelaksanaan	11	-	10,00	45,00	45,00	I
3	Sistem pembangunan	4	-	-	20,00	20,00	III
Total		20	-	10,00	90,00	100,00	Tinggi

Sumber : Analisis data primer, 2015

Keterangan : TS = Tidak setuju, S = Setuju, T = Sangat setuju

Berdasarkan data tingkat pengaruh yang mempengaruhi tingkat persetujuan petani terhadap pengambilan keputusan untuk beralih fungsi lahan mengatakan sangat setuju jika 90% pengambilan keputusan lebih disebebkan oleh adanya kebijakan pemerintah. Jika melihat data pada tabel di atas terbagi 3 bagian yakni mayoritas responden sangat setuju jika petunjuk teknis pelaksanaan sangatlah berpengaruh dengan 45% mengatakan sangat setuju dan 10% setuju.

Untuk 2 kebijakan lainnya yakni UU alih fungsi lahan responden berkata sangat setuju sebesar 25% dan terakhir sistem pembangunan hanya 20% responden yang mengatakan sangat setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan jika petunjuk pelaksanaan memberikan pengaruh besar kepada responden untuk mengalih fungsikan lahan pertaniannya.

2. Harga tanah

Pada aspek tanah merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi responden untuk beralih fungsi lahan diantaranya ada 3 bagian yakni luas lahan, harga tanah, dan harga bangunan. Dimulai dari luas lahan dimana pemerintah mengukur luas lahan responden yang akan digunakan untuk alih fungsi lahan, pada bagian ini responden benar-benar menginginkan jika pengukuran dilakukan dengan seadil mungkin, sehingga harga yang di dapat juga sesuai apalagi ini pengukuran dilakukan oleh pemerintah bukan perseorangan. Selanjutnya berikaitan dengan harga tanah dan harga bangunan kedua kategori yang berbeda dimana pembelian tanah dilakukan dengan membeli tanah dan membeli bangunan. Rata-rata responden mau menjual tanahnya oleh karena mendapatkan harga yang cukup tinggi namun banyak juga diberi harga sangat rendah. Hal ini karena banyak responden yang terpaksa mau menjual tanah dan rumahnya diberi batas waktu tertentu dengan waktu pembayaran tertentu. Berikut ini merupakan tingkat pengaruh tanah dalam pengambilan keputusan alih fungsi lahan:

Tabel 18.Deskripsi Faktor Eksternal Berdasarkan Harga Tanah

No.	Harga Tanah	Jumlah (orang)	Tingkat Persetujuan (%)			Presentase (%)	Ranking
			TS	S	SS		
1	Luas lahan	-	-	-	-	-	-
2	Harga lahan	8	-	30,00	10,00	30,00	II
3	Harga bangunan	12	-	40,00	20,00	40,00	I
Total		20	-	70,00	30,00	100,00	Sedang

Sumber: Analisis data primer, 2015

Keterangan: TS : Tidak setuju, S : Setuju, SS : Sangat setuju

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan jika kebanyakan responden mengatakan jika harga tanah bukanlah faktor utama yang mempengaruhi responden untuk mengambil keputusan beralih fungsi lahan namun memang benar termasuk salah satu faktor yang bisa dikatakan setuju dengan adanya faktor tersebut telah mendorong responden untuk beralih fungsi lahan hal ini berdasarkan data yang diperoleh sebanyak 70% responden mengatakan setuju dan 30% sisanya mengatakan sangat setuju.

Dari total presentase tersebut diperoleh dari 3 faktor yang terdapat pada kegiatan tersebut yakni 40% setuju dan 20% sangat setuju dimana responden memilih harga bangunan yang sangat rendah lah sebagai faktor utama pada kategori harga tanah diikuti oleh harga lahan dengan 30% setuju dan 10% sangat setuju. sedangkan terkahir luas lahan itu sendiri responden memang khawatir tapi tidak memberikan dampak cukup signifikan terhadap harga tanah.

3. Tuntutan pembangunan

Tuntutan pembangunan meruapakan suatu hal dimana dalam pelaksanaannya kegiatan yang dilakukan dikarenakan adanya suatu kebutuhan yang bisa atau tidak bisa harus dipenuhi segera mungkin, karena jika pembangunan tersebut tidak segera dipenuhi akan berdampak pada faktor-faktor lainnya yang bergantung pada ketersediaan bangunan tersebut.

Pada bagian terkahir faktor ekternal yang mempengaruhi petani untuk beralih fungsi lahan yakni adanya tuntutan pembangunan. Tidak bisa kita pungkiri berbagai macam pembangunan saat ini dikarenakan adanya tuntutan pembangunan bukan tanpa sebab, namun lebih karena melihat pentingnya pembangunan dalam rangka mempermudah dan memperbaiki sarana dan prasarana yang ada. Ada 3 kategori yang termasuk dalam tuntutan pembangunan diantaranya yakni, peningkatan sosial ekonomi masyarakat, kebutuhan pembangunan dan terkahir peningkatan insfratuktur.

Dari ketiga faktor tersebut dapat kita lihat apakah cukup memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pengambilan keputusan responden dan mengatakan setuju jika memang tuntutan pembangunan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi responden. Memang jika dilihat sekilas bisa jadi ketiga faktor tersebut memberikan pengaruh dengan tingkat persetujuan tinggi, namun

jika melihat keadaan dilapang lebih cenderung pada peningkatan infrastruktur daerah dikarenakan Jawa Barat merupakan pusat perekonomian nasional.

Berikut ini merupakan tingkat pengaruh tuntutan pembangunan terhadap tingkat persetujuan petani untuk beralih fungsi lahan:

Tabel 19.Deskripsi Faktor Eksternal Berdasarkan Tuntutan Pembangunan

No.	Tuntutan Pembangunan	Jumlah (orang)	Tingkat Persetujuan (%)			Presentase (%)	Ranking
			TS	S	SS		
1	Peningkatan sosial ekonomi	10	50,00	-	-	50,00	I
2	Kebutuhan pembangunan	9	10,00	35,00	-	45,00	II
3	Peningkatan infrastruktur	1	-	5,00	-	5,00	III
Total		20	60,00	40,00	-	100,00	Rendah

Sumber: Analisis data primer, 2015

Keterangan: TS : Tidak setuju, S : Setuju, SS : Sangat setuju

Berdasarkan data yang diperoleh di atas dapat disimpulkan jika tuntutan pembangunan bukan merupakan salah satu pengaruh cukup besar untuk pemerintah melakukan alih fungsi lahan, namun memang beberapa responden mengakui adanya alih fungsi lahan disebabkan oleh karena kebutuhan pembangunan dengan presentase sebesar 35% responden mengatakan setuju. Meskipun tetap secara keseluruhan responden mengatakan tidak setuju jika tuntutan pembangunan menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan dimana presentase akhir pada bagian ini 60% untuk responden yang mengatakan tidak setuju dan 40% sisanya setuju. Jika diperinci reponden mengatakan tidak setuju jika alasannya karena peningkatan sosial ekonomi masyarakat sebesar 50%, dalam hal kebutuhan pembangunan 10% responden tidak setuju sedangkan 35% lainnya mengatakan setuju. Terakhir hanya 5% untuk peningkatan infrastruktur responden mengatakan setuju.

6.1.4 Tingkat Persetujuan Responden Terhadap Faktor Eksternal Alih Fungsi Lahan

Dengan demikian setelah diketahui tingkat persetujuan dari masing-masing. Berikut ini data keseluruhan tingkat persetujuan faktor eksternal:

Tabel 20. Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Tingkat Persetujuan Petani

No.	Faktor Eksternal	Jumlah (orang)	Tingkat Persetujuan (%)			Presentase Tertinggi(%)	Rangking
			TS	S	SS		
1.	Kebijakan pemerintah	20	-	10,00	90,00	90,00	I
	a. UU alih fungsi lahan	5	-	-	25,00		
	b. Petunjuk pelaksanaan	11	-	10,00	45,00		
	c. Sistem pembangunan	4	-	-	20,00		
2.	Harga tanah	20	-	70,00	30,00	70,00	II
	a. Luas lahan	-	-	-	-		
	b. Harga lahan	8	-	30,00	10,00		
	c. Harga bangunan	12	-	40,00	20,00		
3.	Tuntutan pembangunan	20	60,00	40,00	-	60,00	III
	a. Peningkatan sosial ekonomi	10	50,00	-	-		
	b. Kebutuhan pembangunan	9	10,00	35,00	-		
	c. Peningkatan infrastruktur	1	-	5,00	-		

Sumber: Analisis data primer, 2015

Keterangan: TS = Tidak setuju, S = Setuju, SS = Sangat setuju

Dari hasil pengamatan saat dilapang seperti yang terdapat pada tabel di atas, Faktor eksternal merupakan salah satu faktor luar yang mempengaruhi masyarakat untuk mau menjual lahannya atau mengkonversikan lahannya

untukpembangunan bandara. Dari ketiga faktor di atas mayoritas responden sangat setuju jika alih fungsi lahan terjadi karena adanya pengaruh dari kebijakan pemerintah sebesar 90% dengan petunjuk pelaksanaan paling mendominasi sebesar 45%, UU alih fungsi lahan 25% dan 20% sistem pembangunan. Sisanya 10% responden hanya mengatakan setuju jika kebijakan pemerintah dengan salah satu faktornya petunjuk pelaksanaan. Berada di peringkat kedua responden mengatakan sangat setuju sebesar 30% jika pengambilan keputusan alih fungsi lahan disebabkan oleh pengaruh harga lahan dengan presentase 30% sangat setuju dan 70% responden mengatakan setuju. Terkahir tuntutan pembangunan justru masyarakat mengatakan tidak seruju jika itu merupakan alasan untuk beralih fungsi lahan dengan presentase mencapai 60%, namun 30% lainnya responden mangatakan setuju.Berikut ini hasil wawancara yang diperoleh dimana ia menjual tanahnya dikarenakan faktor harga yang cukup tinggi Darma (36).

> *"...Abdi mah da mung aya tanah sakieu kieu na, jadi manga bae lamun bade dipeser ku pamarentah asalkeun dihargaan mahal. Salain ti eta tos aya maksud abdi bade meser tanah di sejen tempat nu mana tanah na oge kena tiasa dipeser dieu ku proyek pembangunan bandara..."*

> *"...Kalau saya hanya punya tanah sedikit, jadi silahkan saja kalau mau dibeli sama pemerintah asal dihargai mahal. Selain dari itu sudah ada maksud saya juga beli tanah di lain tempat dimana tanahnya nanti dapat dibeli lagi sama proyek pembangunan bandara..."*

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa ada beberapa masyarakat yang menjual tanahnya dikarenakan tender mematoknya dengan harga yang cukup tinggi. Selain itu, melihat kejadian di beberapa desa yang sudah tergusur banyak masyarakat yang membeli tanah kembali di daerah yang sebenarnya akan terkena penggusuran kembali akan tetapi belum dilakukan penggukuran atau membangun rumah formalitas alias *"rumah hantu"*. Hal ini dimaksudkan agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih.

Berbeda dengan masyarakat yang menjual tanahnya dikarenakan adanya tuntutan pemerintah. Di bawah ini merupakan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Eman (32)

"...Nya bade kumaha deui nu namina tos kebijakan ti pamarentah mah daek teu daek kudu daek, kapaksa ari rek dibejakeun mah ngajual tanah teh. Da sabenerna mah teu hoyong pindah teh lamun lain kapokoh aya paksaan. Lantaran ayeuna mah lamun rek pindah ka daerah lain the harga tanah geus mahal..."

"...Mau bagaimana lagi namanya juga sudah kebijakan dari pemerintah mau tidak mau harus mau, terpaksa menjual tanah juga. Karena sebenarnya ingin pindah jika bukan karna ada paksaan. Soalnya sekarang pindah ke tempat lain harga tanah mahal..."

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa masyarakat mayoritas merasa terpaksa menjual tanahnya dikarenakan adanya kebijakan pemerintah. Sekalipun harganya murah dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada, dikarenakan beberapa masyarakat ada yang sudah pindah, secara terpaksa keluarga yang lain pun ikut merelakan tanahnya dijual dengan harga murah. Adanya rasa keterpaksaan ini yang memaksa masyarakat harus berpindah tempat dari daerah semula ke daerah yang baru. Proses perpindahan ini yang membutuhkan biaya cukup tinggi, bahkan hasil dari penjualan lahan sebelumnya tidak dapat mencukupi untuk membangun rumah dan lahan yang dimilikinya sesuai seperti sedia kala.

Jika dilihat berdasarkan faktor internal dan eksternal maka tingkat persetujuan masyarakat sebagai berikut:

Tabel 21. Tingkat Persetujuan Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan

No.	Faktor Penentu Keputusan	Jumlah (orang)	Tingkat Persetujuan (%)			Kategori	Peringkat
			TS	S	SS		
1	Faktor Internal	20					
	Pendidikan		-	15,00	85,00	Tinggi	I
	Pendapatan		-	25,00	75,00	Tinggi	II
	Tanggunggan keluarga		-	40,00	60,00	Tinggi	III
	Total	20		26,67	73,33	Tinggi	
2	Faktor Eksternal	20					
	Kebijakan pemerintah		-	10,00	90,00	Tinggi	I
	Harga tanah		-	70,00	30,00	Sedang	II
	Tuntutan pembangunan		60,00	40,00	-	Rendah	III
	Total	**20**	20,00	40,00	40,00	Sedang	Setuju

Sumber: Analisis data primer, 2015

Keterangan: TS = Tidak setuju, S = Setuju, SS = Sangat setuju

Berdasarkan data di atas dapat diketahui faktor internal dan eksternal mana saja yang memang memperoleh tingkat persetujuan tinggi karena memberikan pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan petani untuk beralih fungsi lahan. Dapat dilihat jika mayoritas faktor memberikan pengaruh yang cukup tinggi dengan presentase di atas rata-rata, faktor internal seperti pendidikan, pendapatan dan tanggunggan keluarga responden sepakat mengatakan sangat setuju jika ketiga faktor tersebut memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan petani dalam beralih fungsi lahan. Selanjutnya untuk faktor eksternal yang mempengaruhi petani dalam beralih fungsi lahan dimana responden mangatakan sangat setuju jika faktor eksternal itu mempengaruhi dalam pengambilan keputusan hanya ada satu faktor saja yakni faktor kebijakan pemerintah, Berikut ini merupakan bagan tingkat persetujuan :

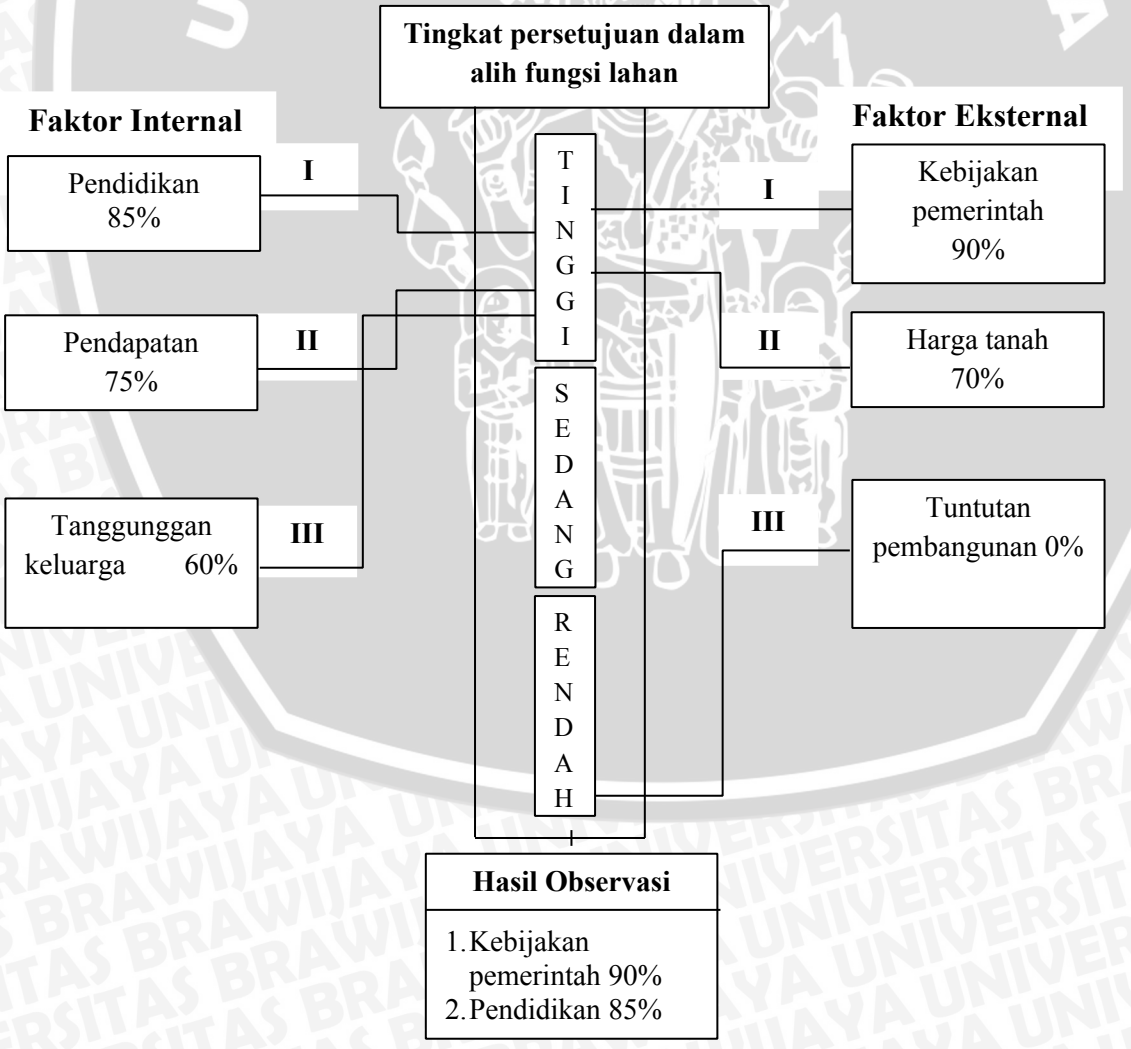

Gambar 1. Tingkat persetujuan responden dalam proses alih fungsi lahan

Berdasarkan gambar di atas kita dapat melihat tingkat persetujuan masyarakat terkait adanya perbandingan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi alih fungsi lahan pembangunan bandara di Desa Sukamulya. Terlihat jika masyarakat lebih dominan mengatakan jika kebijakan pemerintah sebagai salah satu faktor eksternal adalah salah satu penyebab masyarakat mau beralih fungsi lahan dengan persentase mencapai 90%. Selanjutnya faktor latar belakang pendidikan yang merupakan faktor internal menjadi penyebab kedua masyarakat mau beralih fungsi lahan dengan tingkat persentase mencapai 85%. Kedua faktor ini mendapat tingkat persetujuan tinggi dari masyarakat yang terkena dampak alih fungsi lahan hal ini dikarenakan sangat memberikan pengaruh yang besar dalam pegambilan keputusan untuk alih fungsi lahan. Seperti dijelaskan sebelumnya jika masyarakat yang berpendidikan rendah cenderung menerima berapapun tanahnya dibeli dengan harga rendah oleh pemerintah karena tidak mengerti, begitupun dengan kebijakan pemerintah yang jelas dengan adanya kebijakan tersebut mau tidak mau masyarakat harus rela beralih fungsi lahan. Dua faktor terakhir yakni tingkat pendapatan dengan persentase sebesar 75%, masyarakat mengatakan sangat setuju karena dengan tingkat pendapatan yang rendah masyarakat cenderung dapat menerima ketika lahannya dibeli oleh pemerintah. Lain halnya dengan harga tanah dimana memperoleh tingkat persentase 70% namun dalam tingkat persetujuan setuju saja karena masyarakat beranggapan suatu keberuntungan jika ada masyarakat yang memiliki tanah lalu terkena alih fungsi lahan namun dihargai dengan harga yang cukup tinggi.

Sedangkan terakhir dengan tingkat persetujuan tidak setuju yakni tuntutan pembangunan sebesar 60% tang berarti 0% responden mengatakan sangat setuju jika tuntutan pembangunan merupakan salah satu penyebab alih fungsi lahan, masyarakat mengatakan jika sebenarnya pembangunan bandara tidaklah diperlukan karena dirasa masih ada fasilitas transportasi lain yang dapat dimaksimalkan namun belum terkelola dengan baik.

Dapat disimpulkan jika kebijakan dan pendidikan merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi petani untuk mengalih fungsikan lahan. Karena kedua

faktor ini benar-benar memberikan dampak pengambilan keputusan petani yang sangat besar.

6.2 Peran Pihak-pihak Terkait dalam Pengalih Fungsian Lahan

Alih fungsi lahan tidak pernah lepas dari adanya keterikatan dengan pihak-pihak terkait yang ikut andil dalam proses alih fungsi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan yang terjadi di Desa Sukamulya merupakan alih fungsi lahan yang lebih disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam rangka mempermudah mobilitas beserta alasan lainnya yang memang itu dimaksudkan untuk meningkatkan sumber perekonomian Indonesia. Dalam alih fungsi lahan yang terjadi di Desa Sukamulya melibatkan beberapa pihak diantaranya: pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pihak swasta, LSM, dan masyarakat itu sendiri. Peran-peran dari mereka inilah yang nantinya akan diketahui seberapa besar peranannya terhadap proses pelaksanaan alih fungsi lahan.

Sebelum dilanjutkan dengan peranan dari masing-masing pihak terkait perlu diketahui jika terdapat 6 pihak terkait yang mempengaruhi jalannya proses alih fungsi lahan yang terjadi di Desa Sukamulya. dari total 6 peranan ada 3 peran yang itu berasal dari pemerintah, karena bagaimanapun alih fungsi lahan yang terjadi di Desa Sukamulya dalam rangka pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat merupakan mega proyek Pemerintah, dimana semua pelaksanaan lebih bergantung pada arahan dan saran dari pemerintah itu sendiri. Peranan dari masing-masing sub pemerintahan seperti pemerintah Provinsi dan daerah saling bahu membahu untuk mewujudkan pembangunan bandara tersebut. Selain itu, peran dari pihak swasta selaku investor akan sangat mempengaruhi keberlangsungan pembangunan. Hal ini pun dibantu dengan adanya fungsi LSM yang menghubungkan antara pihak swasta, pemerintah dan masyarakat. Sebelum lebih jauh ini merupakan peranan dari masing-masing pihak terkait:

1. Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat merupakan salah satu pusat komando adanya kebijakan dalam mega proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Pemerintah hanya sebatas memberikan perintah berupa wacana pembangunan BIJB. Terkait masalah biaya pembangunan dikembalikan ke Provinsi dalam hal ini Jawa Barat dimana sebagian dana diambil dari APBD. Adapun keterlibatan

pemerintah pusat dalam alih fungsi lahan lebih kepada peran yang bersifat kebijakan secara umum seperti penjelasan mengenai UU alih fungsi lahan, petunjuk pelaksananaan dan sistem pembangunan. Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan landasan peraturan Pemerintah dalam:

1) UU No. 41 tahun 2009 tentang PLPPB
2) UU NO. 26 TAHUN 2007 pasal 33 ayat 1
3) PP No. 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Alih Fungsi LPPB
4) Peraturan menteri kehutanan No P.50/Menhut-II/2009 tentang Penugasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan

Di mana ke empat peraturan tersebut yang diberikan kepada pemerintah provinsi dan akan jadikan sebagai dasar pembuatan surat ketarangan selanjutnya yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berikut ini merupakan keterlibatan peran pemerintah pusat dalam alih fungsi lahan :

Tabel 22. Keterlibatan Peran Pemerintah Pusat Dalam Alih Fungsi Lahan

No.	Jenis Peranan	Jumlah (orang)	Tingkat Keterlibatan (%)			Presentase Tertinggi (%)	Ranking
			R	S	T		
1.	UU alih fungsi lahan	20	-	-	100,00	100,00	I
2	Petunjuk pelaksanaan	20	-	30,00	70,00	70,00	II
3.	Sistem pembangunan	20	50,00	30,00	20,00	50,00	III
Total		20	16,67	20,00	63,33	100,00	Tinggi

Sumber: Analisis data primer, 2015

Keterangan:

R = Tidak terlibat dalam pengalih fungsian lahan
S = Kurang terlibat dalam pengalih fungsian lahan
T = Sangat banyak terlibat dalam pengalih fungsian lahan

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel di atas menunjukkan jika tingkat keterlibatan pemerintah dalam hal kebijakan sangatlah menentukkan keberlangsungan alih fungsi lahan yang dijalankan. Dari tiga peranan pemerintah

yakni dimulai dari penjelasan mengenai undang-undang alih fungsi lahan responden mengatakan jika keterlibatan dari peranan pemerintah dalam hal ini mencapai 100% karena memang sebagai acuan. Selanjutnya untuk petunjuk pelaksanaan pembangunan bandara masih cukup tinggi yakni mencapai 70% sangat banyak terlibat dan 20% sisanya ada, namun kurang terlibat. Terakhir untuk sistem pembangunan ada sedikit responden yang mengatakan jika sangat banyak keterlibatan pemerintah dalam sistem pembangunan hanya mencapai 20%, paling tinggi justru responden mengatakan jika tidak ada peran sama sekali mengenai sistem pembangunan yang dijabarkan oleh pemerintah diperoleh sebesar 50%, 30% sisanya responden yang mengatakan ada keterlibatan namun tidak terlalu banyak menentukan dalam alih fungsi lahan.

2. Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Surat Keputusan Gubernur No.553.2/Kep.817-Dalprog/2004 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Persiapan Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Desa palasah, Kecamatan Kertajati, Kabupaten majalengka; dengan Surat Keputusan Gubernur No.553.2/Kep.1228-Dalprog/2004 pada tanggal 6 Desember 2004 ; Pembentukan Tim Pengendalian Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (TPP-BIJB) dengan Surat Keputusan Gubernur No.553.2/Kep.73-dalprog/2006 tanggal 9 Februari 2006; Pembentukan Badan kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat No. 553.2/Kep-74-dalprog/2006 Tanggal 9 Februari 2006 ; Penetapan lokasi Badan Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan BIJB (BKPP-BIJB) dengan Surat Keputusan Gubernur No.553.2/Kep.760-Dalprog/2006 tanggal 23 Agustus 2006 (Kesbang, 2015).

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut yang mendorong pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat dapat berjalan hingga kini. Berkaitan dengan sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah kepada masyarakat seiring adanya pembangunan bandara tersebut hanya sebatas penyedia lapangan kerja bagi masyarakat yang ada di sekitar proyek pembangunan tersebut dengan upah mencapai 3,5jt/bulan di tambah dengan uang makan Rp.50.000/hari. Akan tetapi untuk sarana yang lainnya seperti perelokasian masyarakat yang tergusur

pemerintah lepas tangan, hanya sampai proses pembayaran selesai (Kesbang Sukamulya, 2015).

Dalam pembangunan mega proyek bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), peran pemerintah provinsi sangatlah besar, karena pelaksanaan utama berupa penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan konsep pembangunan serta perencanaan ke depannya lebih terpusat pada kebijakan yang ada pada pemerintah provinsi, namun begitu ada 3 fokusan utama yang diamati dalam keterlibatan peranan pemerintah provinsi dalam alih fungsi lahan yakni mengenai pembiayaan pembangunan, pembebasan lahan, dan terakhir adalah pembayaran lahan.

Sumber pendanaan berasal dari swasta murni atau gabungan antara APBN, APBD dan swasta. Sumber pendanaan APBN, diarahkan kepada pembiayaan pekerjaan konstruksi sisi udara, alat Bantu visual dan navigasi, peralatan telekomunikasi dan meteorology, bangunan gedung dan perlengkapannya dan fasilitas pelayanan. Untuk sumber pendanaan APBD diarahkan kepada biaya fasilitasi pembangunan infrastruktur jalan akses menuju lokasi bandara dan pembebasan lahan untuk area bandara (1800 ha). Sedangkan sumber pendanaan yang berasal dari swasta akan diarahkan kepada pekerjaan perencanaan, pembebasan lahan pendukung (3200 ha), pekerjaan bangunan gedung dan perlengkapannya, pekerjaan fasilitasi sisi darat, pekerjaan fasilitasi depo BBM, pekerjaan peralatan operasi dan pemeliharaan, biaya jalan akses ke jalan toll.

Untuk teknis di lapang mengenai pembebasan dan pembayaran lahan serta bangunan yang dilakukan pihak terkait kepada masyarakat dilakukan beberapa tahap, tergantung tanah yang akan digunakan bandara tersebut diukur pada tahun berapa. Karena proses pengukuran atau pembebasan lahan tidak dilakukan satu waktu sekaligus melainkan berangsur-angsur, tapi untuk pembayaran dilakukan secara kontan yang dikirim melaui rekening yang dibuatkan oleh pemerintah. Anehnya banyak rekening “siluman” sehingga ada beberapa warga yang justru mendapatkan uang lebih.

Adanya permasalahan tersebut perlu adanya perbaikan terkait keterlibatan pemerintah Provinsi, sehingga peranan-peranan yang dijalankan dapat berjalan maksimal, tujuan pembangunan bandara dapat berjalan dengan lancer begitupun

dengan masyarakat dapat menerima dengan tanpa paksaan untuk menjual lahannya kepada pemerintah.

Berikut ini merupakan keterlibatan pemerintah provinsi dalam alih fungsi lahan pembangunan bandara:

Tabel 23. Keterlibatan Peran Pemerintah Provinsi Dalam Alih Fungsi Lahan

No.	Jenis Peranan	Jumlah (orang)	Tingkat Keterlibatan (%)			Presentase Tertinggi (%)	Ranking
			R	S	T		
1.	Pembiayaan pembangunan	20	-	100,00	-	100,00	III
2	Pembebasan lahan	20	-	25,00	75,00	75,00	II
3.	Pembayaran lahan	20	-	10,00	90,00	90,00	I
Total		20	-	45,00	55,00	100,00	Tinggi

Sumber: Analisis data primer, 2015

Keterangan:

R = Tidak terlibat dalam pengalih fungsian lahan
S = Kurang terlibat dalam pengalih fungsian lahan
T = Sangat banyak terlibat dalam pengalih fungsian lahan

Berdasarkan data pada tabel 23 tentang keterlibatan pemerintah provinsi dalam alih fungsi lahan jika ditotal termasuk dalam kategori tinggi dengan presentase sebesar 55%. Dari 3 peranan pemerintah provinsi hanya pembiayaan pembangunan yang mendapat respon 100% kurang terlibat dalam hal alih fungsi lahan. Hal ini dikarenakan sumber pembiayaan bangunan diambil dari APBD dan juga investor atau pihak swasta yang ikut terlibat di dalamnya. Sedangkan kedua peranan lainnya yakni berkenaan dengan pembebasan lahan yang dilanjutkan dengan pembayaran lahan mengatakan jika pemerintah sangat terlibat dengan presentase mencapai 75% dan responden yang mengatakan kurang terlibat hanya 25%, untuk pembayaran lahan 90% responden mengatakan sangat besar keterlibatannya dan hanya 10% responden yang mengatakan kurang terlibat. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dengan responden yakni pak Marta (42):

"*…Pembebasan lahan nu dilakukeun pamarentah the asa teu alus, soalna loba keneh masayarakat nu teu satuju jeung pembangunan bandara teh. Ahirna oge bener masayarakat satuju, tapi angger wae teu pake babadamian heula jeung masyarakat, komo deui pas diukur lahanna ngan saukur difoto teu di ukur bener-bener. Ari jang pembayaran mah lancer si, ngan aya nu sok rada ganjil, aya nu dikirim leuwih loba ti kasepakatan awal aya oge nu dicicil dibayar 2 kalieun…"*

"…Pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah tidak baik, soalnya banyak masyarakat tidak setuju dengan pembangunan bandara. Akhirnya masyarakat setuju, tapi tidak dengan cara musyawarah, apalagi pada saat lahan diukur hanya difoto saja. Kalau untuk pembayaran lancar. Hanya masih merasa ganjil, ada yang dikirim lebih banyak dibanding saat kesepakatan awal hanya dua kali..."

Berdasarkan pernyataan di atas, pak Marta (42) mengatakan bahwa proses keterlibatan pemerintah provinsi dalam alih fungsi lahan tidak lah berjalan dengan baik, dimulai dari proses pembebasan lahan dimana pemerintah langsung melakukan tindakan tanpa melakukan pembebasan secara baik-baik. Selain itu, pengukuran lahan dalam rangka pembebasan lahan tidak dilakukan dengan sebaik mungkin, hanya sebatas di ukur melalui skala foto saja. Begitu halnya dengan proses pembayaran lahan meski cukup berjalan dengan baik, namun ternyata masih ada kendala dalam beberapa hal.

3. Pemerintah Daerah

Akhir dari pelaksanaan alih fungsi lahan untuk pembangunan bandara bertumpu pada pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Majalengka. Kegiatan lapang yang dilakukan dalam rangka melaksanakan mandat atau SK yang telah dibuat oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk diturunkan dengan SK yang dibuat oleh sekretaris daerah berdasarkan arahan dari Bupati Majalengka tentang kebijakan harga tanah, sosialisasi pembangunan serta pengaturan lainnya. Selain itu, sebagian dana APBD Kabupaten Majalengka digunakan untuk pembangunan bandara.

Gubernur Jawa Barat sebagai penanggung jawab program, telah berupaya melakukan sosialisasi ke berbagai stakeholder dan kalangan masyarakat.

Gubernur melakukan kunjungan ke lokasi BJIB dan sekaligus melakukan ekspose. Di level provinsi, Gubernur telah melakukan sosialisasi rencana pembangunan BJIB kepada para anggota DPRD, Kepala SKPD, para Bupati/Walikota dan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat serta para pimpinan BUMD, yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2006, bertempat di Ruang Sidang DPRD Prov. Jabar. Pada level Nasional, telah pula dilakukan sosialisasi, yaitu kepada Ketua DPD RI, Ginanjar Kartasasmita di Kantornya, pada bulan November 2006. Kemudian pada Bulan januari 2007, dilakukan pemaparan dihadapan para anggota DPR-RI asal daerah pemilihan Jawa Barat, bertempat di Hotel Hyatt Bandung.

Keterlibatan pemerintah daerah sangatlah besar, karena hampir keseluruhan kegiatan lapang dan kesepakatan dengan masyarakat dilakukan oleh pemerintah daerah. Ada 4 peranan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah yakni sosialisasi mengenai alih fungsi lahan baik berupa sosialisasi SK, kesepakatan harga dan lain sebagainya. Proses sosialisasi yang di berikan kepada masyarakat di beberapa desa yang terkena dampak penggusuran pun dilakukan oleh pihak pemerintah yang di wakilkan oleh Dishub dan Satgas. Akan tetapi, banyak hal-hal yang perlu di garis bawahi karena sosialisasi yang diberikan hanya sebatas menjelaskan terkait pembagian kelas harga tanah, harga tanah sudah dibuat berdasarkan aturan Pemerintah Daerah tapi dalam kenyataannya tidak sesuai. Harga tanah yang di beli oleh Dishub terkadang lebih murah dari catatan yang ada, hingga pada akhirnya tidak ada titik temu mengenai kesepakatan harga antara pihak Dishub serta satgas dengan pemerintah daerah. Adapun masyarakat yang sudah menjual tanahnya diakui karena terpaksa dan karena adanya tuntutan dari Kepala Desa yang sudah menjalin kesepakatan dengan Dishub serta mendapat imbalan atas kesepakatan yang dijalinnya. Proses sosialisasi hanya sebatas pemberitahuan mengenai adanya alih fungsi lahan serta negosiasi lahan yang hanya sebatas formalitas tanpa ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Selanjutnya kegiatan yang bersifat pasca alih fungsi lahan seharusnya dilakukan pemerintah yakni ada penyuluhan, pendampingan dan monitoring. Dimana kegiatan tersebut akan menentukan kondisi masyarakat pasca alih fungsi lahan justru tidak mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah, padahal

jika kegiatan ini dapat dilaksanakan minimalnya masyarakat dapat lebih terkondisikan hidupnya di masa mendatang. Ketika penyuluhan dapat dijalankan dengan baik sebagaimana mestinya, petani yang terkena dampak alih fungsi lahan tidak merasa khawatir karena adanya penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah, begitupun dengan pendampingan ketika benar-benar dijalankan ada suatu proses bimbingan bagaimana pemerintah dapat menuntun masyarakat agar dapat hidup mandiri di tempat yang baru. Terakhir pada kegiatan monitoring pemerintah dapat terus memantau kondisi masyarakat pada saat setelah alih fungsi lahan.

Berikut ini data keterlibatan peran pemerintah daerah dalam alih fungsi lahan:

Tabel 24. Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah Dalam Alih Fungsi Lahan

No.	Jenis Peranan	Jumlah (orang)	Tingkat Keterlibatan (%)			Presentase Tertinggi (%)	Ranking
			R	S	T		
1.	Sosialisasi alih fungsi lahan	20	-	-	100,00	100,00	I
2	Penyuluhan	20	100,00	-	-	100,00	II
3.	Pendampingan	20	100,00	-	-	100,00	III
4.	Monitoring	20	100,00	-	-	100,00	IV
Total		20	75,00	-	25,00	100,00	Rendah

Sumber: Analisis data primer, 2015

Keterangan:

R = Tidak terlalu terlibat dalam pengalih fungsian lahan
S = Kurang terlibat dalam pengalih fungsian lahan
T = Sangat banyak terlibat dalam pengalih fungsian lahan

Berdasarkan data keterlibatan peran pemerintah daerah Kabupaten Majalengka dalam alih fungsi lahan sangatlah minim. Hal ini dapat dilihat dimana keterlibatan pemerintah paling besar dari ke empat peranan hanya proses sosialisasi saja dimana peranan pemerintah daerah mencapai 100% sangat banyak terlibat sedangkan 3 peran lainnya yakni penyuluhan, pendampingan dan monitoring tidak ikut terlibat sama sekali alias semua responden mengatakan 100% tidak ada pelaksanaannya.

Kenyataan di lapang petani yang sudah menjual lahannya dilepas begitu saja dengan diberi pesangon hasil penjualan lahannya, tanpa diberi bekal berupa keilmuan yang cukup untuk dapat beradaptasi terhadap kehidupan di tempat baru nantinya. Pemerintah seolah lepas tanggung jawab atas keputusan alih fungsi lahan yang telah di putuskan di Desa Sukamulya. Hal inilah yang menjadi titik balik penolakan dari masyarakat Desa Sukamulya khususnya para petani yang tergusur, mereka menolak untuk berpindah dari Desa Sukamulya hingga adanya perbaikan proses alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, pengajuan syarat yang diberikan masyarakat Desa Sukamulya kepada pemerintah harus direalisasikan sebagai jaminan untuk kebaikan hidup masyarakatnya di kemudian hari. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu responden yakni Pak Ajid (53):

> *"... saparantos ayeuna pindah ka tempat nu anyar, asa bet teu aya tindak lanjut kanggo masyarakat ti pamarentah the, padahal urang sorangan ngaharepkeun ayana penyuluhan atawa arahan ti pamarentah najan hirup urang teu terlantar kawas ayeuna ieu. Nya pindahan teh bating eweuh pisan tanggung jawab ti pamarentah..."*

> *"...Setelah pindah ke tempat baru, merasa tidak ada tindak lanjut buat masyarakat dari pemerintah, padahal saya sendiri mengharapkan adanya penyuluhan atau arahan dari pemerintah meskipun hidup saya terlantar seperti sekarang. Ya pindahan sama sekali tidak ada tanggung jawab dari pemerintah..."*

Pernyataan di atas menunjukkan jika pemerintah tidak melakukan kegiatan pasca alih fungsi lahan, responden merasa jika alih fungsi lahan dilakukan tanpa ada tindak lanjut kedepannya untuk kehidupan masyarakat di masa mendatang.

Pada bagian ini pemerintah benar-benar harus melakukan evaluasi secara besar-besaran karena proses pendampingan dan monitoring adalah 2 faktor utama dalam alih fungsi lahan, ketika 2 faktor ini tidak berjalan baik maka masyarakat pun akan berpotensi memiliki kualitas hidup yang lebih rendah dibanding sebelumnya. Alih fungsi lahan di Desa Sukamulya tidaklah melibatkan 1 desa saja tetapi justru melibatkan 3 Kecamatan dengan banyak Desa di setiap kecamatannya. Oleh karena itu, kedua kegiatannya harus didorong sebaik mungkin untuk dapat dilaksanankan dan diharapkan dapat membantu

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa yang terkena alih fungsi lahan khususnya Desa Sukamulya sendiri.

4. LSM

Alih fungsi lahan biasanya tidak terlepas dari adanya peran LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang ikut andil berperan didalamnya. Peran LSM cukup banyak, namun pada umumnya lebih kepada melakukan pendekatan antara kedua belah pihak baik masyarakat ataupun pemerintah. dalam kaitannya dengan keterlibatan alih fungsi lahan di Desa Sukamulya dilihat dari segi keberpihakan dan tugas yang seharusnya dilakukan oleh LSM ada 2 yakni proses hearing dengan masyarakat, dimana LSM berusaha untuk menampung dan menerima saran masyarakat mengenai permasalahan yang ada di masyarakat. Tugas yang lain lebih kepada penyelesaian konflik alih fungsi lahan yang terjadi di Desa Sukamulya, karena bagaimanapun seharusnya LSM menjadi penghubung dan penyelesai konflik antara masyarakat yang terkena dampak alih fungsi lahan dengan pemerintah sebagai penyelenggara. Berikut ini merupakan keterlibatan peran LSM dalam alih fungsi lahan:

Tabel 25. Keterlibatan Peran LSM Dalam Alih Fungsi Lahan

No.	Jenis Peranan	Jumlah (orang)	Tingkat Keterlibatan (%)			Presentase (%)	Ranking
			R	S	T		
1.	Proses hearing dengan masyarakat	20	100,00	-	-	100,00	I
2	Penyelesaian konflik	20	100,00	-	-	100,00	II
Total		20	100,00	-	-	100,00	Rendah

Sumber: Analisis data primer, 2015

Keterangan:

R = Tidak terlalu terlibat dalam pengalih fungsian lahan
S = Kurang terlibat dalam pengalih fungsian lahan
T = Sangat banyak terlibat dalam pengalih fungsian lahan

Berdasarkan data pada tabel di atas mengenai keterlibatan peranan LSM dalam pengalih fungsian lahan sangatlah rendah, bahkan dapat dikatakan tidak ada tindakan sama sekali yang diambil oleh LSM untuk ikut peran dalam proses alih

fungsi lahan yang terjadi di Desa Sukamulya. Hal ini dapat dilihat dengan kegiatan yang dilakukan LSM biasanya yakni hearing dengan pihak masyarakat yang terkena dampak alih fungsi lahan, dan terakhir tahap penyelesaian konflik. Berdasarkan data kegiatan di atas responden mengatakan 100% dari kedua kegiatan tersebut tidak ikut terlibat dan berperan dalam pengalih fungsian lahan. hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh bapak Didin (39):

> *"... Emang si katinggali di Desa Sukamulya teh aya LSM, nya lamun diitung mah aya mereun satahun di lembur ieu ngan can apal naon nu digawean jeung naon tujuannnya. Lamun samisal kumpul jeung masyarakat oge ngan sauukur kumpul biasa tara ngabahas masalah nu aya di lembur..."*

> *"...Memang kelihatan di Desa Sukamulya ada LSM, sudah sekitar satu tahun, hanya tidak hafal betul kegiatan dan tujuannya apa. Jika semisal kumpul sama masyarakat hanya sebatas kumpul biasa tidak pernah membahas permasalahan di kampung..."*

Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas menunjukkan jika tidak ada keterlibatan atau peranan LSM dalam pengalih fungsian lahan yang terjadi di Desa Sukamulya, beliau pun mengatakan jika tidak tahu adanya LSM ini berpihak pada siapa atau bagaimana kerja yang jelasnya. Karena semenjak berdiri di Sukamulya 1 tahun yang lalu tidak ada kerja yang jelas dan nyata di masyarakat.

5. Pihak Swasta

Pada bagian ini banyak sekali pihak swasta atau pihak yang berada tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Selain perusahaan swasta yang memang ditugaskan untuk membangun proyek pembangunan bandara kertajati aeocity seperti PT. Sanijaya Mandiri (Partner Dari Hochtief Airport Jerman), Guangdong Petro Chemical ENG.Contruction, China, PT. Jatayu sarana investasi, PT Lintas Marga Sedaya dan lain sebagainya. Selain itu, banyak dari investor asing yang menanam saham untuk proyek pembangunan tersebut karena terbatasnya modal untuk pembangunan bandara tersebut. Jika dilihat berdasarkan sumber yang diperoleh realisasi investasi Kabupaten Majalengka pada 2014 menembus angka Rp844,8 miliar, pencapaian itu lebih tinggi dari realisasi investasi pada 2013 yang hanya mencapai Rp.451 miliar bahkan jauh lebih tinggi dibanding realisasi

investasi 5 tahun sebelumnya (2009) yang hanya menembus angka Rp.191,9 miliar. (Bisnis Indonesia 25 Pebruari 2015).

Keterlibatan pihak swasta dalam alih fungsi lahan lebih kepada bagian teknis pelaksanaan pembangunan dan penanaman modal dari investor yang ingin bekerjasama dalam pembangunan bandara. Hingga saat ini proses pembangunan bandara masih berjalan, namun masih terdapat banyak kendala diantara peran investor yang masih kurang sehingga pendanaan untuk pembangunan masih belum bisa tercukupi. Seharusnya pemerintah segera mengambil tindakan akan pembangunan tidak berhenti begitu saja tanpa ada keberlanjutan yang jelas, karena yang dirugikan bukan hanya tersendatnya pembangunan akan tetapi, masyarakat juga merasa di gantungkan dengan keadaan yang ada. Berikut ini merupakan keterlibatan pihak swasta dalam alih fungsi lahan:

Tabel 26. Keterlibatan Peran Pihak Swasta Dalam Alih Fungsi Lahan

No.	Jenis Peranan	Jumlah (orang)	Tingkat Keterlibatan (%)			Presentase Tertinggi (%)	Ranking
			R	S	T		
1.	Penanaman modal	20	-	75,00	25,00	75,00	II
2	Pelaksanaan pembangunan	20	-	-	100,00	100,00	I
Total		20	-	37,50	62,50	100,00	Tinggi

Sumber: Analisis data primer, 2015

Keterangan:

R = Tidak terlibat dalam pengalih fungsian lahan
S = Kurang terlibat dalam pengalih fungsian lahan
T = Sangat banyak terlibat dalam pengalih fungsian lahan

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 22 menunjukkan jika keterlibatan pihak swasta dalam alih fungsi lahan sangatlah tinggi dimana hasil akhir menunjukkan 62,5% responden mangatakan jika pihak swasta sangat banyak terlibat. Jika dipernci pelaksanaan pembangunan sepenuhnya diserahkan pada pihak swasta meski tetap dalam pengawasan pemerintah provinsi dan daerah dimana memperoleh presentase sebesar 100% sedangkan untuk penanaman modal responden mengetahui jika pihak swasta khususnya investor tidak terlalu banyak

terlibat itu sebabnya pembangunan hingga saat ini masih terhambat, cukup wajar jika presentase tertinggi ada pada tahap sedang dengan presentase mencapai 75% dan sisanya responden yang mengatakan banyak terlibat sebesar 25%.

Pada keterlibatan pihak swasta ada hal yang cukup menarik yakni, banyak oknum oknum yang terlibat dan cenderung merugikan bahkan membuat pembangunan semakin terhambat. Diantaranya adalah banyaknya penanam modal "abal-abal" yang justru mendadak membeli tanah yang terkena penggusuran namun belum diukur oleh dinas perhubungan sebagai pihak pengatur proses pembayaran tanah yang disediakan pemerintah. Sebagai contoh, ada Kepala Desa yang berasal dari Desa Biawak menggarap lahan yang ia miliki di lahan yang terkena penggusuran dengan membangun "rumah hantu", yakni rumah yang dibangun tapi tidak berpenghuni dengan maksud memperoleh ganti rugi dari pemerintah atas hak bangunan rumah serta tanahnya, karena harga luas tanah dengan harga bangunan rumah berbeda. Selain itu banyak sekali masyarakat yang sudah tergusur dan memperoleh ganti rugi pindah ke daerah lain, tapi daerah tersebut pun terkena akan digusur, hanya saja bagian tanah itu belum diukur oleh pemerintah. Seperti hasil wawancara yang saya peroleh dari bapak Marta (42):

> *"…Abdi gaduh bumi mung saukur luasna 30 bata, ayeuna tos kena gusur dihargaan 500rb/bata. Lamun ayeuna eta hasil ngajual bumi dianggo ngabangun bumi diluar desa asa teu cekap. Jadi we kanggo nutupan kakuranganana abdi nagabangun rumah hantu sareng rumah nu ku abdi di tempatan. Naon maksadna? Lantaran ngarasa kirang kanggo nutupan kahirupan sapopoe sareng kahirupan kaluaraga kaharep. Ngarasa salah aya oge, tapi nya kumaha deui asa eweuh tanggung jawab ti pamarentah kanggo kahirupan rakyat kapayun…"*

> *"…Saya punya rumah hanya 300 bata, sekarang sudah kena gusur dihargai 50r/bata. Kalau sekarang hasil menjual tanah dipake membangun rumah diluar desa tidak cukup. Jadi sekarang buat menutupi kekurangan saya membangun rumah hantu sama rumah yang sekarang ditempati. Apa maksudnya? Soalnya merasa kurang buat menutupi kehidupan keluarga sehari-hari. Merasa salah juga, tapi ya bagaimana lagi dirasa tidak ada tanggung jawab dari pemerintah buat kehidupan rakyat kedepan..."*

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa ketiadaan tanggung jawab lebih dari pemerintah terhadap masyarakat, yang mengakibatkan banyaknya investor "abal-

abal" atau keluarga yang sudah tergusur membeli tanah kembali di tempat yang belum dibebaskan dengan maksud memperoleh ganti rugi kembali untuk menutupi pembangunan sebelumnya yang dirasa tidak mencukupi.

6. Masyarakat Desa Sukamulya

Proses alih fungsi lahan tidak serta merta berjalan dengan baik, banyak sekali kendala di lapangan yang sangat menghambat proses pambangunan bandara. Diantara pihak-pihak terkait sebelumnya merupakan pihak yang menginginkan segera berlangsungnya proses pembangunan bandara serta sudah dilakukan pembebasan lahan. Berbeda dengan masyarakat di Desa Sukamulya Nampak terlihat solid dan mutlak menolak adanya penggusuran untuk pembangunan bandara. Alih-alih menolak semenjak wacana pembangunan pada tahun 2003 digulirkan hingga tahun 2013 tetep menolak, namun kini seiring berjalannya waktu masyarakat Desa Sukamulya mulai luluh dan siap jika nantinya daerah tersebut akan digusur. Bagaimanapun proses alih fungsi lahan tidak dapat terlepas dari keberpihakan masyarakat dalam alih fungsi lahan yang terjadi. Karena pasti perhatian pemerintah ketika wacana pembangunan bandara digulirkan justru seharusnya perhatian tertuju pada bagaimana kehidupan masyarakat setelah alih fungsi lahan. Tetapi berbeda kondisi dengan alih fungsi lahan yang terjadi di Desa Sukamulya dimana masyarakat tidak menjadi subjek utama atau mendapat perhatian lebih dari pemerintah, malainkan hanya sebagai prioritas kedua setelah lahan yang akan dialihfungsikan.

Tetapi sebelum membahas lebih lanjut mengenai itu, di bawah ini merupakan keterlibatan peran masyarakat dalam alih fungsi lahan:

Tabel 27. Peranan Keterlibatan Masyarakat Dalam Alih Fungsi Lahan

No.	Jenis Peranan	Jumlah (orang)	Tingkat Keterlibatan (%)			Presentase Tertinggi (%)	Ranking
			R	S	T		
1.	Kerelaan menjual tanah	20	85,00	15,00	-	85,00	II
3.	Keterlibatan dalam pembangunan	20	100,00	-	-	100,00	I

Total	20	92,50	7,50	-	100,00	Rendah

Sumber: Analisis data primer, 2015

Keterangan:

R = Tidak terlibat dalam pengalih fungsian lahan
S = Kurang terlibat dalam pengalih fungsian lahan
T = Sangat banyak terlibat dalam pengalih fungsian lahan

Berdasarkan data peran keterlibatan masyarakat di atas menunjukkan jika masyarakat sebenarnya menolak jika alih fungsi lahan dilakukan, hal ini dapat dilihat berdasarkan data di atas dimana dalam kerelaan menjual tanah banyak responden yang tidak bersedia untuk menjual lahannya terbukti dengan presentase diperoleh 85% sedangkan 15% sisanya ada yang bersedia untuk dijual. Jika di total secara keseluruhan peranan masyarakat cenderung menolak atau tidak ingin terlibat dalam alih fungsi lahan yang dilakukan. Sedangkan dalam hal keterlibatan responden dalam pembangunan bandara memperoleh presentase 100% tidak terlibat dalam pengalih fungsian lahan tersebut. Hal ini pun berdasarkan wawancara yang diperoleh dengan pak Carsidi (33):

> *"...Saennyana mah kapaksa ngajual lahan teh, rek kumaha deui? Geus jelas aya kabijakana ti pamaerentah najan nolak oge anger we pasti bakalan ka gusur, nya geus bae da embung hese kop wae dijual eta lahan jeung imah teh. Ayeuna tangtu hese neangan pagawean, tapi urang mah najan hese oge embung da gawe ngabantuan pamarenta ngabangun bandara najan buruhna gede oge. Da urang mah angger teu satuju aya pembangunan bandara teh.*
>
> *"...Sebenernya terpaksa menjual tanah, mau bagaimana lagi? Sudah jelas kebijakan dari pemerintah meskipun menolak juga tetep tergusur, ya sudah karena tidak mau susah silahkan saja tanah dan rumah dijual. Sekarang pasti susah cari pekerjaan, tapi meskipun susah saya tidak mau bekerja membantu pemerintah sekalipun gajinya besar. Karena saya tetap tidak setuju adanya pembangunan bandara itu..."*

Berdasarkan petikkan wawancara di atas menyatakan jika masyarakat menjual lahan kepada pemerintah karena merasa terpaksa. Selain itu, sekalipun sekarang sudah berpindah profesi, masyarakat yang terkena penggusuran tetap menolak untuk bekerja di proyek pembangunan bandara. Hal ini dikarenakan penolakan yang sudah dilakukan sebelum pembangunan dimulai, masyarakat

berfikir bukan karena butuh uang atau penghasilan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga, jauh daripada itu ini merupakan salah satu aksi mereka menolak pembangunan bandara. Lebih baik mencari penghasilan dari pekerjaan lain daripada bekerja untuk suatu hal yang memang ia menolaknya.

Untuk lebih jelas melihat data keseluruhan peran pihak-pihak terkait yang terlibat dalam alih fungsi lahan sebagai berikut:

Tabel 28. Tingkat Keterlibatan Pihak-pihak Terkait Dalam Alih Fungsi Lahan

No	Jenis Peranan	Jumlah (orang)	Tingkat Keterlibatan (%)			Kategori	Ranking
			R	S	T		
1.	Pemerintah pusat	20	16,67	20,00	63,33	**Tinggi**	I
	a. UU alih fungsi lahan	20	-	-	100,00	Tinggi	
	b. Petunjuk pelaksanaan	20	-	30,00	70,00	Tinggi	
	c. Sistem pembangunan	20	50,00	30,00	20,00	Rendah	
2.	Pemerintah provinsi	20	-	45,00	55,00	**Tinggi**	III
	a. Pembiayaan pembangunan	20	-	100,00	-	Sedang	
	b. Pembebasan lahan	20	-	25,00	75,00	Tinggi	
	c. Pembayaran lahan	20	-	10,00	90,00	Tinggi	
3.	Pemerintah daerah	20	75,00	-	25,00	**Rendah**	IV
	a. Sosialisasi alih fungsi lahan	20	-	-	100,00	Tinggi	
	b. Penyuluhan	20	100,00	-	-	Rendah	
	c. Pendampingan	20	100,00	-	-	Rendah	
	d. Monitoring	20	100,00	-	-	Rendah	
4.	LSM	20	100,00	-	-	**Rendah**	VI
	a. Proses hearing	20	100,00	-	-	Rendah	
	b. Penyelesaian konflik	20	100,00	-	-	Rendah	
5.	Pihak swasta	20	-	37,50	62,50	Tinggi	II
	a. Penanaman modal	20	-	75,00	25,00	Sedang	
	b. Pelaksanaan pembangunan	20	-	-	100,00	Tinggi	
6.	Masyarakat	20	92,50	7,50	-	**Rendah**	V

	a. Kerelaan menjual tanah	20	85,00	15,00	-	Rendah	
	b. Keterlibatan dalam pembangunan	20	100,00	-	-	Rendah	
Total		20	47,36	18,33	34,30	Rendah	

Sumber: Analisis data primer, 2015

Keterangan:

R = Tidak terlibat dalam pengalih fungsian lahan
S = Kurang terlibat dalam pengalih fungsian lahan
T = Sangat banyak terlibat dalam pengalih fungsian lahan

Berdasarkan hasil keseluruhan yang diperoleh dapat dilihat jika tingkat keterlibatan dari 6 peranan yang ikut terlibat dalam alih fungsi lahan sangatlah rendah. Meskipun begitu ada peranan-peranan yang terlibat cukup besar dalam alih fungsi lahan diantaranya ada UU alih fungsi lahan termasuk dalam kategori keterlibatan tinggi, dimana dalam alih fungsi lahan yang dilakukan tentunya harus berdasarkan landasan sehingga wajar jika UU alih fungsi lahan memiliki keteribatan tinggi. Selain itu ada petunjuk pelaksanaan termasuk kategori tinggi juga karena pelaksanaan dilapang nantinya akan mengacu pada petunjuk pelaksanaan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Begitupun dengan pembebasan lahan dan pembayaran lahan, yang memang termasuk bagian vital dalam alih fungsi lahan dimana pembayaran ini nantinya akan digunakan untuk keperluan hidup masyarakat kedepannya. Adapun untuk sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat pun termasuk tinggi, karena dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat dapat lebih tahu mengenai alih fungsi lahan itu sendiri dan keberlanjutan jangka panjang masyarakat di masa mendatang.

Selanjutnya yang termasuk peranan dengan keterlibatan rendah cukup banyak diantaranya sistem pembangunan, dimana pemerintah tidak dapat mengatur sebaik mungkin sistem yang akan dijalankan, ada juga penyuluhan, pendampingan, dan monitoring yang pada kenyataannya pemerintah tidak menjalankan kegiatan ini. Padahal aspek ini sangat perlu diperhatikan pasca alih fungsi lahan. hal ini diikuti oleh proses keterlibatan peran LSM dalam alih fungsi lahan sangatlah rendah dimana LSM tidak ikut melakukan peranan seperti hearing

dengan masyarakat dan ikut menyelesaikan konflik yang terjadi karena ketidaksetujuan masyarakat dalam alih fungsi lahan yang terjadi.

Seiring dengan konflik yang terjadi mendorong masyarakat untuk tidak ikut terlibat juga dalam hal kerelaan menjual lahan dimana masyarakat sebenarnya tidak mau menjual lahan, hanya karena ada paksaan dan dorongan dari pemerintah sehingga terpaksa menjualnya, begitupun dengan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan bandara. Wajar jika pelaksanaan pembangunan sepenuhnya dilakukan pihak swasta dan termasuk kategori keterlibatan tinggi dan penanaman modal sedang.

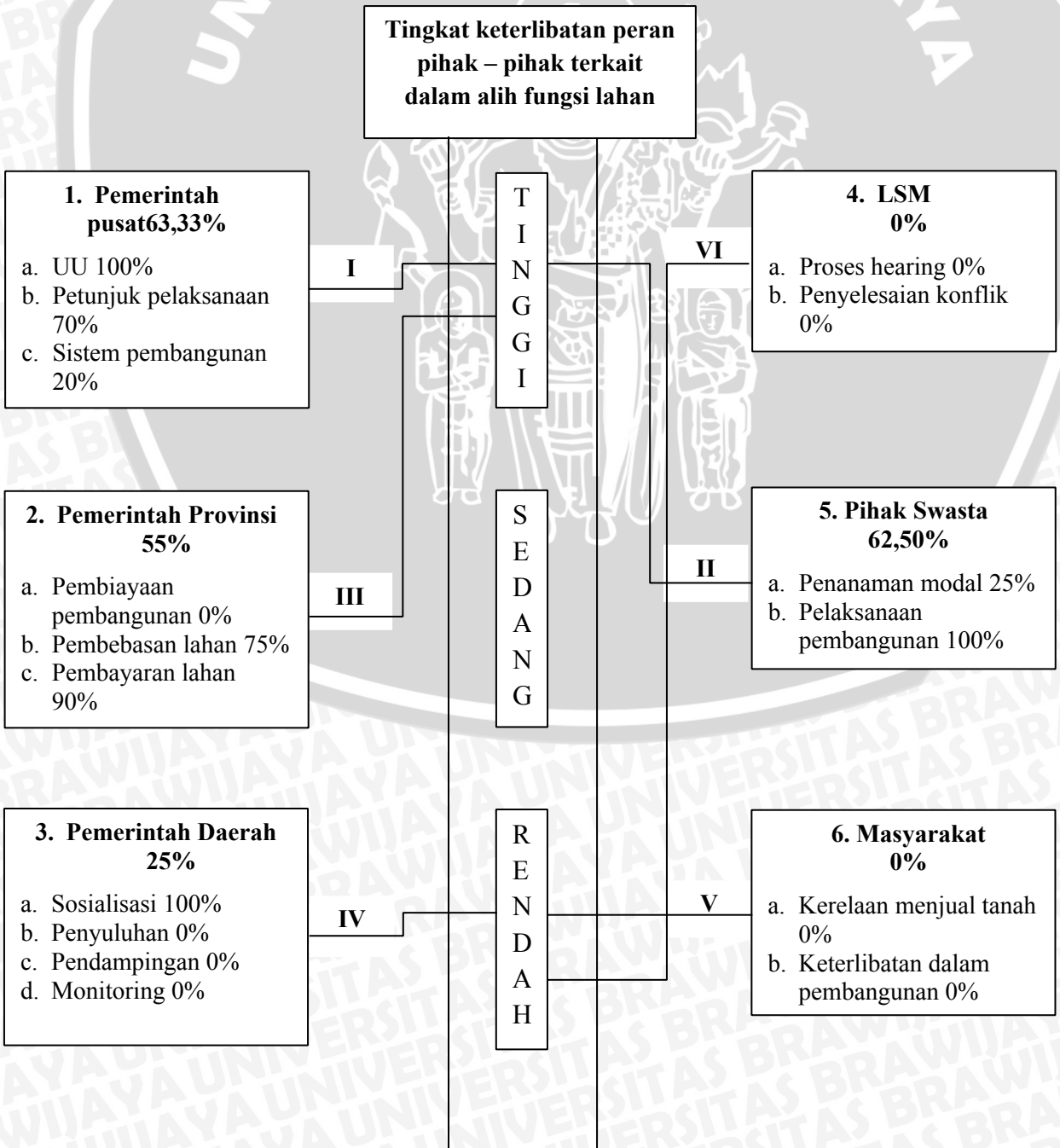

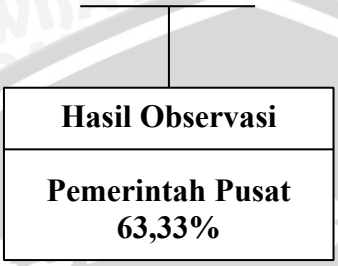

Gambar 2. Tingkat keterlibatan peran pihak-pihak terkait dalam alih fungsi lahan

Berdasarkan bagan tingkat keterlibatan peran pihak-pihak terkait di atas, pada akhirnya dapat kita ketahui masih ada peran-pihak pihak terkait yang tidak maksimal sehingga membuat pelaksanaan alih fungsi lahan tidak berjalan dengan baik, sekalipun dalam beberapa aspek keterlibatan pihak terkait termasuk dalam kategori tinggi namun tetap tidak berjalan dengan maksimal.

Dapat kita lihat jika responden menilai dimana pemerintah pusat termasuk kategori tinggi dengan presentase mencapai 63,33%, diikuti oleh peran pihak swasta dalam hal pembangunan sebesar 62,5%, lalu terakhir ada pemerintah provinsi sebesar 55%. Lain halnya dengan beberapa peran dengan kategori rendah seperti LSM justru 0%, begitu juga masyarakat 0%. Berbeda dengan pemerintah daerah masih memiliki tingkat keterlibatan 25% sekalipun itu masih belum dalam membantu kelancaran dari alih fungsi lahan.

Perlu diketahui penduduk Desa Sukamulya terbagi menjadi 2 kubu yakni, kubu pro terhadap pembangunan bandara dalam artian sudah ada beberapa masyarakat yang menjual tanahnya secara diam-diam kepada dinas perhubungan yang di bantu oleh satuan tugas, dan kubu kontra yang dengan tegas menolak adanya pembangunan bandara. Adapun semenjak awal tahun 2014 kubu kontra spontan siap di gusur dengan mengajukan beberapa syarat yang telah disepakati oleh pemerintah desa beserta jajaran dan masyarakat yang kontra dan masih belum menjual keseluruhan lahan miliknya kepada pemerintah. Melihat

penggusuran yang sudah dilakukan pada desa-desa sebelumnya, di mana tidak ada aturan yang jelas terkait proses alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pemerintah seperti: harga tanah yang tidak sesuai karena tidak menemukan titik temu pada saat musyawarah yang cenderung menggunakan aturan baku yang telah dibuat oleh pemerintah, selanjutnya tidak adanya relokasi yang jelas terhadap masyarakat yang sudah tergusur dan pindah ke tempat lain, terakhir tidak adanya proses pendampingan oleh pemerintah mengenai mata pencaharian masyarakat setelah pindah dari desa tersebut.

Seiring dengan tidak maksimalnya peran pihak-pihak terkait yang ikut mengambil peran dalam alih fungsi lahan yang dilakukan ada beberapa kesepakatan yang ingin dilakukan oleh kedua belah pihak antara masyarakat dan pemerintah untuk menghindari hal-hal tersebut dibuatlah persyaratan yang diajukan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak yang bertugas sebagai divisi pembangunan Desa. Di mana kesepakatan ini di ambil dari hasil musyawarah dengan masyarakat Desa Sukamulya diantaranya:

1. Perlu adanya peninjauan kembali terkait pengukuran luas areal lahan secara real, tidak hanya melalui skala foto.
2. Adanya aturan harga tanah dan bangunan yang jelas serta disepakati anatara kedua belah pihak yakni pihak pemerintah dengan masyarakat desa.
3. Masyarakat Desa Sukamulya yang tergusur nantinya, Pemerintah harus bertanggung jawab dengan mencarikan lahan yang memadai untuk 1 Desa sukamulya. Sehingga masyarakat tetap utuh berkumpul di satu tempat dan tidak berpencar.
4. Adanya tanggung jawab terkait perubahan mata pencaharian yang mayoritas petani. Agar di kemudian hari masyarakat bisa tetap hidup dengan tingkat kesejahteraan yang cukup.
5. Tidak terjadi baku hantam, serta keributan antara kedua belah pihak pada saat terjadi penggusuran nantinya.

Dengan adanya usulan hasil musyawarah tersebut masyarakat berharap sistem pembangunan bandara yang kini sedang dilakukan dapat dilakukan perubahan seiring dengan banyaknya permasalahan diberbagai peranan yang

terkait dalam pemabngunan bandara yang terjadi di Desa Sukamulya. Adanya hasil musyawarah tersebut bukan semata untuk menguntungkan masyarakat saja karena jika dilihat sekilas masyarakatlah yang sangat dirugikan dengan adanya pembangunan bandara tersebut. Tetapi, jauh dari pada itu masyarakat menginginkan adanya keadilan sehingga baik masyarakat maupun pemerintah kedepannya mendapatkan pelajaran dan tidak melakukan kesalahan lagi bila mana pemerintah akan melakukan alih fungsi lahan kembali untuk pembangunan lainnya. Dengan adanya pelajaran dari masalah ini dapat menjadi perhatian utama jika masyarakat sebenarnya merupakan prioritas utama untuk diberi suatu pelajaran berkenaan dengan adanya alih fungsi lahan yang terjadi.

6.3 Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi dan Budaya Rumah Tangga Petani

Adanya alih fungsi lahan mempengaruhi pada kualitas hidup petani terutama adanya perubahan keadaan petani setelah alih fungsi lahan dilakukan, baik itu berupa penurunan ataupun peningkatan, tentunya sangat bergantung pada bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan suatu kondisi. Kondisi yang berusaha masyarakat perbaiki khususnya di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Ketiga kondisi ini merupakan 3 faktor utama yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, dimana diantara ketiganya harus saling berkaitan dan sama-sama harus dipenuhi. Dengan terpenuhinya 3 faktor tersebut maka dapat mengangkat derajat seseorang dihadapan masyarakat lainnya yang tinggal bersamanya. Ketika salah satu dari ketika faktor peningkatan kualitas hidup ini tidak dapat dipenuhi dengan baik, maka akan ada suatu hal yang dirasa kurang dipandangan masyarakat. Seperti contoh: seseorang yang memiliki pendapatan tinggi identik dengan punya mobil, rumah mewah serta tanah yang luas. Dengan kualitas ekonomi tinggi masyarakat akan mengatakan jika ia kaya. Namun di sisi lain kurang bergaul atau bersosialisasinya ia dengan masyarakat sekitar membuat orang lain memandang dan mengatakan jika orang tersebut terlalu kaya dan sombong, sehingga wajar saja jika tidak ingin bermasyarakat dengan kita.

Oleh karena itu, dengan adanya suatu permisalan berikut memiliki arti jika peningkatan kualitas hidup khususnya kualitas ekonomi rumah tangga petani harus diimbangi dengan baiknya kualitas sosial dan budaya. Dalam kehidupan yang terjadi di Desa Sukamulya sebelum terjadinya alih fungsi lahan daerah tersebut merupakan suatu Desa yang sangat rukun. Kualitas ekonomi dengan tingkat pendapatan tinggi dari pertanian, keadaan sosial yang cukup baik juga, dimana masyarakat semuanya aktif di kegiatan perkumpulan yang didakan pihak desa atau dalam lingkup kecil yakni RT. Selain itu, ketika kedua aspek ini berjalan baik diikuti dengan kualitas budaya yang baik juga, dimana masyarakat dengan tingkat sosial tinggi dapat melaksanakan kebudayaan yang biasa dilakukan oleh Desa Sukamulya secara bersama baik budaya dalam bertani ataupun kerukunan dalam beragama. Hal inilah yang akan dapat dilihat bagaimana perbandingan kondisi sebelum dan setelah alih fungsi lahan di Desa Sukamulya.

6.3.1 Perbandingan Kondisi Sosial Rumah Tangga Petani Sebelum dan Sesudah Alih Fungsi Lahan

Dampak yang diakibatkan oleh adanya alih fungsi lahan yang pertama adalah adanya suatu perubahan kondisi sosial dalam masyarakat. Ada 3 hal yang dapat dilihat dari kondisi sosial baik sebelum dan setelah alih adanya alih fungsi lahan yakni kemampuan memberi nafkah, keaktifan dalam organisasi, dan keaktifan dalam donatur. Kemampuan memberi nafkah merupakan salah satu kategori dimana dapat dilihat bagaimana peluang atau kesempatan kerja responden setelah adanya alih fungsi lahan. Tingginya kemampuan memberi nafkahkan dapat mempengaruhi tingkat pendapatan responden, begitu sebaliknya.

Kepekaan dan tingkat sosial hubungan masyarakat baik dapat dilihat dari keaktifan masyarakat itu sendiri dalam bersosialisasi dengan yang lainnya. Baik aktif atau tidaknya dalam organisasi desa seperti contoh gabungan kelompok tani dan lain-lain. Begitupun dengan keaktifan petani dengan jiwa sosial tinggi dapat dilihat dari partisipasi masyarakat untuk membayar iuran yang nantinya akan digunakan untuk bersama. Ketiga faktor inilah yang nantinya akan dijadikan perbandingan kondisi sosial responden di Desa Sukamulya setelah adanya alih fungsi lahan.

Pada dasarnya ketiga faktor di atas memang yang dijadikan tolak ukur untuk melihat kondisi sosial responden baik sebelum ataupun setelah adanya alih fungsi lahan, tapi disamping itu perhatian justru mengarah pada ke khawatiran terjadinya kesenjangan sosial dalam masyarakat khususnya setelah adanya alih fungsi lahan. Untuk menghindari agar semua itu tidak terjadi perlu dilakukan keseimbangan sosial dengan mengkondisikan daerah yang baru lebih aktif dalam bermasyarakat dan tidak membedakan responden ketika berada di lingkungan baru dilihat dari tingkat ekonominya saja. Karena tentu perlu adanya dukungan moril dari masyarakat kepada responden yang terkena dampak alih fungsi lahan. Berikut ini merupakan tabel perbandingan kondisi sosial sebelum dan setelah adanya alih fungsi lahan:

Tabel 29. Perbandingan Kondisi Sosial Sebelum dan Setelah Adanya Alih Fungsi Lahan

No	Kondisi Sosial	Jumlah (orang)	Sebelum Alih Fungsi Lahan			Setelah Alih Fungsi Lahan			Rata - rata	Ranking
			R	S	T	R	S	T		
1.	Kemampuan memberi nafkah	20	10,00	50,00	40,00	50,00	15,00	35,00	37,50	III
2.	Keaktifan dalam organisasi	20	5,00	60,00	35,00	20,00	20,00	60,00	47,50	II
3.	Keaktifan dalam donatur	20	10,00	40,00	50,00	10,00	25,00	65,00	57,50	I

Sumber: Analisis Data Primer (2015)

Keterangan:

R = Lebih sedikit sebelum atau setelah alih fungsi lahan
S = Tidak ada perubahan baik sebelum atau setelah alih fungsi lahan
T = Lebih baik sebelum atau setelah alih fungsi lahan

Berdasarkan tabel 29 di atas menunjukkan jika nilai tertinggi setelah dirata-rata sebelum dan setelah alih fungsi lahan menempatkan keaktifan dalm donatur berada pada rangking tertinggi dengan presentase 57,50% sedangkan kemampuan patani memberi nafkah memperoleh presentase terendah dengan

37,50%. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan setelah adanya alih fungsi lahan, sedangkan terjadi peningkatan dalam hal keaktifan dalam donatur setelah adanya alih fungsi lahan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sonadi (61):

> *"...Nya abdi mah ngarasa biasa wae ari kanggo damel mah, lantaran salain ti hasil tani, kadang abdi oge buburuh, tapi nya biasa wae teu sabaraha ngaruh".*

> *"...Ya kalau saya merasanya biasa saja jika buat pekerjaan, soalnya selain dari hasil tani, terkadang saya juga menjadi buruh tapi ya biasa saja tidak terlalu berpengaruh".*

Sedangkan untuk kemampuan memberi nafkah responden dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga setelah adanya alih fungsi lahan lebih di dominasi oleh petani yang merasa kesulitan mencari pekerjaan sebesar 50%, biasa-biasa saja 15%, dan mudah 35%. Masih tingginya petani yang menyatakan lebih mudah mendapat pekerjaan setelah adanya alih fungsi lahan adalah dikarenakan, sebagian dari mereka memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang responden ia mengatakan:

> *"...Urang mah da ngan buruh tani, aya lahan oge ngan saeutik, pindah ka Sukamulya the jadi lebih boga kauntungan lantaran buburuh di Sukamulya mah bisa sampe meunang 75.000 satengah poe na..."*

> *"...Saya hanya buruh tani, ada lahan tapi sedikit, pindah ke sukamulya itu jadi lebih beruntung soalnya bekerja di Sukamulya gajinya bisa mencapai 75.000 dalam ½ hari..."*

Ia mengatakan jika kepindahannya ke Sukamulya lebih menguntungkan karena imbalan yang diberikan tuan tanah besar di Desa tersebut relative lebih besar dibanding desa sebelumnya. Lain halnya dengan besarnya persentase yang menyatakan lebih sulit dikarenakan petani tersebut hanya memiliki lahan yang kecil dan berada tidak jauh dengan Desa Sukamulya. Sehingga secara pekerjaan dan pendapatan sama akan tetapi, kondisi rumah serta pemenuhan kebutuhan lainnya bertambah sulit seiring tingginya harga tanah untuk membangun rumah kembali yang mengakibatkan petani hanya mampu membangun rumah semi

permanen.Indikator skor setelah adanya alih fungsi lahan mengalami penurunan dengan skor 2.6 (54%) yang termasuk dalam kategori sedang.

Berkaitan dengan Perbandingan keaktifan responden berdasarkan tabel mengenai perbandingan keaktifan responden dalam kegiatan masyarakat terlihat adanya suatu perubahan. Kondisi sebelum adanya alih fungsi lahan lebih dominan kadang-kadang sebesar 60%, diikuti oleh petani yang sering aktif sebesar 35% dan tidak pernah sebesar 5%. Hal ini berbanding terbalik dengan setelah adanya alih fungsi lahan dimana responden menunjukkan lebih sering aktif di kegiatan perkumpulan sebesar 60% serta untuk petani yang kadang-kadang aktif dan tidak pernah sama sekali, sama besar yakni 20%.

Melihat adanya perbedaan antara sebelum dan setelah, dimana sebelum presponden masih merasa jika aktif di perkumpulan tidak terlalu memberikan keuntungan di tambah faktor kerukunan masyarakat pada desa sebelumnya. Berbeda dengan responden yang dahulunya tidak menetap di Sukamulya dan kini tinggal disana justru menjadi aktif dikarenakan Sukamulya begitu erat hubungan kekeluargaannya dibandingkan desa sebelumnya. Selain itu kegiatan masyarakat relatif lebih banyak di Desa Sukamulya. Adapun bertambahnya petani yang tidak aktif di perkumpulan dikarenakan ia pindah ke wilayah pinggiran dimana jauh dari akses jalan utama atau balai desa.

Dapat disimpulkan dari ketiga faktor yang memberikan dampak perubahan sosial paling signifikan setelah adanya alih fungsi lahan adalah kemampuan memberi nafkah dengan rata-rata hanya mencapai 37,5% ini menandakan jika kemampuan memberi nafkah yang dimiliki responden setelah adanya alih fungsi lahan akan semakin sulit untuk didapatkan. Selanjutnya faktor kedua yang memberikan dampak perubahan kondisi sosial adalah keaktifan dalam organisasi masyarakat yang mana hanya mencapai 47,5%, meskipun ada perubahan besar dimana tingkat keaktifan responden dalam organisasi dari 35% menjadi 60%. Masih dalam kategori baik jika adanya alih fungsi lahan justru meningkatkan kualitas keaktifan responden dalam organisasi. Terakhir adalah keaktifan responden dalam kegiatan iuran masyarakat dengan rata-rata mencapai 57,5% dimana setelah adanya alih fungsi lahan mengalami perubahan yang lebih baik sebesar 15% ini menandakan jika adanya alih fungsi lahan tidak terlalu

berpengaruh terhadap keaktifan dalam donatur responden dan Desa Sukamulya termasuk salah satu desa yang aktif dan baik dalam kegiatan sosial masyarakatnya.

Responden yang terkena dampak alih fungsi lahan lalu berpindah ke Desa Sukamulya cenderung berada dalam kondisi sosial yang baik, kegiatan masyarakat di Desa Sukamulya dapat berjalan dengan baik dimana dapat merangkul semua elemen masyarakat baik masyarakat pribumi ataupun masyarakat asing namun sama terkena dampak dari alih fungsi lahan tersebut. Wajar jika pada akhirnya alih fungsi lahan tidak cukup memberikan pengaruh nyata terhadap kondisi sosial masyarakat, meskipun memang masih ada pengaruh di beberapa sisi namun tidak terlalu mengalami penurunan secara signifikan. Berikut ini merupakan bagan tingkat perbandingan kondisi sosial sebelumdan setelah alih fungsi lahan:

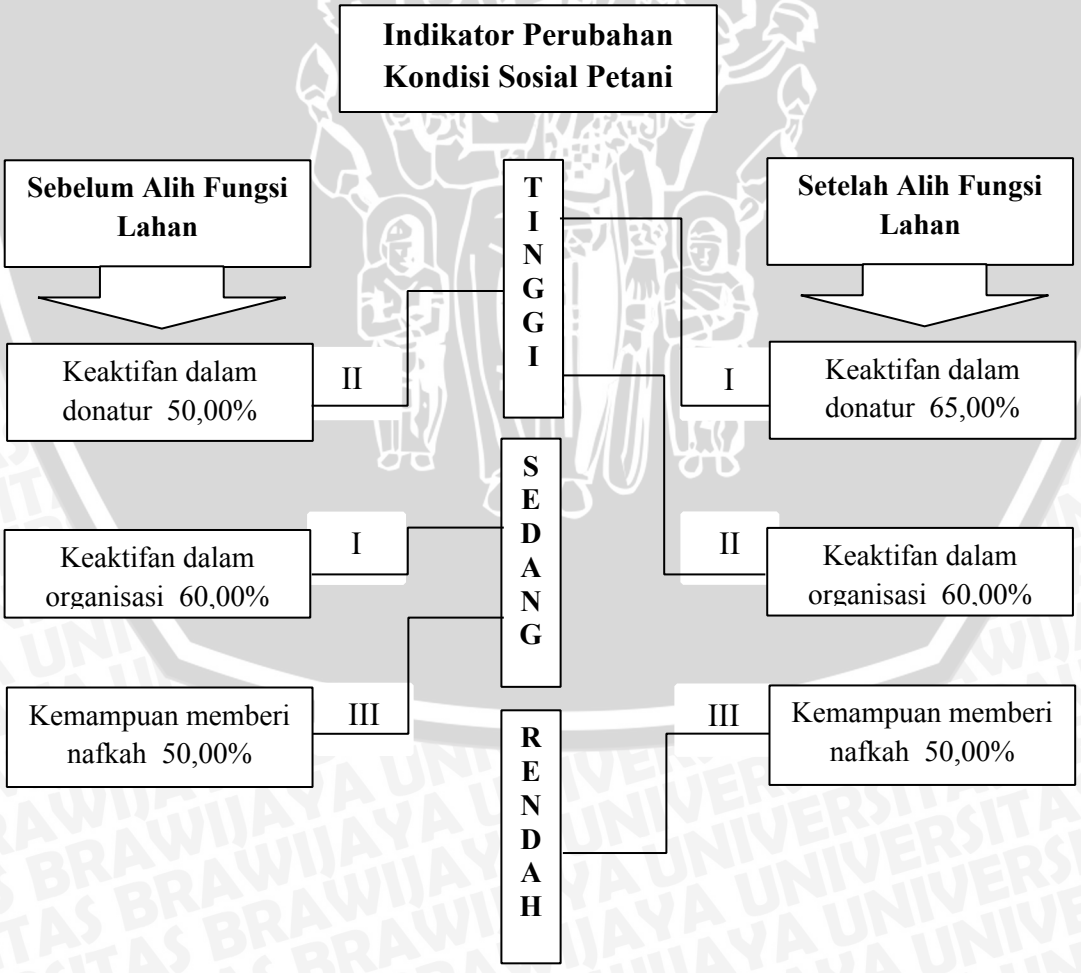

Gambar 4. Bagan indikator perubahan kondisi sosial petani sebelum dan setelah alih fungsi lahan

Berdasarkan data yang terdapat pada bagan di atas dimulai dari keaktifan petani dalam donatur meskipun dominan masuk kategori tinggi, namun terdapat peningkatan sebesar 15% dari sebelumnya 50% menjadi 65%. Sedangkan untuk keaktifan dalam organisasi pun terdapat peningkatan dimana sebelumnya mayoritas responden termasuk sedang saja sebesar 60%, setelah alih fungsi lahan terjadi reponden menjadi aktif dan termasuk kategori tinggi dengan presentase sebesar 60%. Terakhir untuk kemampuan petani dalam meberi nafkah pun terlihat meningkat dari sebeumnya paling dominan 50% pada kategori sedang menjadi 50% pada kategori tinggi justru terjadi setelah alih fungsi lahan. Ini berarti adanya alih fungsi lahan berdampak cukup baik terhadap kondisi sosial petani khususnya masyaarkat Desa Sukamulya. Karena jika dilihat aktivitas masyarakat disana akanmenjadikan masyarakat yang tidak terlalu aktif bersosialisasi akan secara sendirinya menjadi aktif.

6.3.2 Perbandingan Kondisi Ekonomi Rumah Tangga Petani Sebelum dan Sesudah Alih Fungsi Lahan

Banyak kriteria untuk menentukkan baik buruknya kondisi ekonomi rumah tangga petani. Untuk mengetahui perbandingan kondisi ekonomi petani sebelum dan setelah adanya alih fungsi lahan ada beberapa kriteria diantaranya luas lahan, hewan ternak, alat transportasi yang digunakan, alat komunikasi yang digunakan, alat hiburan yang dimiliki, keadaan rumah petani, frekuensi makan, kebutuhan pakaian dan terkahir yaitu tingkat pendapatan itu sendiri.

Dimulai dari luas lahan yang merupakan awalan terjadinya alih fungsi lahan, bagaimanapun kepemilikan luas lahan dapat menentukan kualitas hidup responden setelah adanya alih fungsi lahan. Dilanjutkan dengan kepemilikan hewan ternak merupakan salat satu aset yang biasanya dimiliki petani, kondisi aset kepemilikan hewan ternak ini dapat dilihat lebih banyak atau justru berkurang seiring dengan adanya alih fungsi lahan. Begitupun dengan aset lainnya seperti alat transportasi, hiburan, dan komunikasi yang merupakan salah satu tolak ukur kekayaan yang dimiliki oleh responden apakah kesemuanya itu masih dimiliki dan dapat digunakan seiring dengan adanya alih fungsi lahan.

Lalu keadaan rumah yang jelas nampak dari kualitas dan kondisi bangunan petani setelah adanya alih fungsi lahan, melihat kondisi rumah responden adalah hal yang paling mudah karena ini berkaitan dengan kemampuan responden untuk membangun rumah baru. Selain dari kondisi rumah dilanjutkan dengan frekuensi makan responden dimana ini merupaka salah satu kebutuhan primer yang mau tidak mau harus dapat terpenuhi secara normal atau 1 hari 3 kali makan. Disamping frekuensi makan responden pun dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan membeli pakaian yang merupakan kebutuhan sekunder yang terkadang memang perlu dipenuhi seiring dengan berjalannya waktu dan bertumbuhnya fisik diri.

Terakhir adalah inti dari semua kategori yang ada pada kondisi ekonomi petani yakni pendapatan yang diperoleh petani sebelum dan setelah adanya alih fungsi lahan. Pada bagian ini akan sangat terlihat kemampuan petani untuk dapat memperoleh pendapatan yang lebih baik seiring adanya alih fungsi lahan atau justru lebih baik ketika memang belum adanya alih fungsi lahan.

Tabel 30. Perbandingan Kondisi Ekonomi Sebelum dan Setelah Alih Fungsi Lahan

No	Kondisi Ekonomi	Jumlah (orang)	Sebelum Alih Fungsi Lahan			Setelah Alih Fungsi Lahan			Rata - rata	Ranking
			R	S	T	R	S	T		
1	Luas lahan	20	75,00	5,00	20,00	80,00	5,00	15,00	17,50	XI
2	Hewan ternak	20	75,00	5,00	20,00	95,00	-	5,00	12,50	X
3	Alat transportasi	20	15,00	60,00	25,00	5,00	80,00	15,00	20,00	VIII
4	Alat komunikasi	20	5,00	10,00	85,00	5,00	-	95,00	90,00	II
5	Keadaan rumah	20	30,00	12,00	58,00	15,00	65,00	10,00	34,00	VII
6	Kondisi penerangan	20	-	20,00	80,00	-	-	100,00	90,00	III
7	Sumber air	20	-	90,00	10,00	-	-	100,00	55,00	V
8	Alat hiburan	20	-	15,00	85,00	-	-	100,00	92,50	I
9	Frekuensi makan	20	-	30,00	70,00	-	35,00	65,00	67,50	IV
10	Kebutuhan pakaian	20	25,00	75,00	-	55,00	30,00	15,00	7,50	XII

11	Pendapatan menurut pengalaman	20	35,00	20,00	45,00	55,00	5,00	40,00	42,50	VI

Sumber: Analisis data primer (2015)

Keterangan:

R : Kondisi ekonomi lebih buruk sebelum atau setelah alih fungsi lahan
S : Tidak ada pengaruh baik sebelum atau setelah adanya alih fungsi lahan
T : Kondisi ekonomi lebih tinggi sebelum atau setelah alih fungsi lahan

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel di atas menunjukkan dari total 11 faktor yang ada diperoleh hasil dengan rata-rata tertinggi atau tidak terlalu presentase akhir dari perbandingan kondisi ekonomi sebelum dan setelah alih fungsi lahan adalah kepemilikan alat hiburan dengn presentase mnacapai 92,50% , sedangkan yang paling rendah atau perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah ada pada faktor kebutuhan pakaian dimana presentase akhir hanya mencapai 7,5% saja.

Gambaran petani mengenai beberapa faktor lainnya seperti sumber air dimana kebanyakan masyarakat sudah menggunakan PDAM, kepemilikan tanah yang memang kebanyakan kurang dari 0,33ha, begitupun dengan kepemilikan alat komunikasi dan transportasi yang relatif tidak banyak berubah, hanya saja ada perubahan untuk kepemilikian alat transportasi dari sedang ke tinggi atau rendah, mengenai kepemilikan hewan ternak kebanyakan masyarakat tidak berternak, namun ada juga yang memiliki hewan ternak dan sebagian dijual untuk keperluan yang lain setelah adanya alih fungsi lahan sebagaimana disampaikan oleh salah bapak Jumadi (46) :

> *"...Rek kumaha deui a da kapaksa ngajual embe teh, lantaran butuh duit keur dipake kanggo ngabangun bumi deui, najan ngan menang sabarah bata oge nu penting mah bisa jang ngiuhan..."*

> *"...Mau bagaimana lagi a terpaksa menjual kambing, dikarenakan butuh uang untuk digunakan membangun rumah, meskipun dapat berapa bata juga yang penting bisa buat berteduh..."*

Sebagaimana pernyataan di atas petani tersebut terpaksa menjual hewan ternaknya dikarenakan perlu uang untuk membangun rumah yang baru kembali, meskipun kecil yang penting bisa digunakan untuk tinggal sementara.

Pada kondisi rumah petani sebelum dan setelah alih fungsi lahan dengan penilainan berdasarkan kualitas atap, dinding, dan lantai dapat disimpulkan lebih dominan mengalami penurunan kualitas bangunan. Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh dari salah seorang responden Pak Rush (36) mengatakan,

> *"...Ayeuna urang boga imah the nu penting bisa jang ngiuhan ku sabab duit hasil ngajual imah the teu mahi jang ngabangun imah nu minimal sarua kondisina jeung bareto. Coba bae bayangkeun lamun di itung-itung mah boga tanah the beuki turun, lamun bareto tanah imah the nu ka jual 30 bata ayeuna meuli tanah deui jang cicing di Desa Sukamulya ngan saukur meunang 10 bata bari jeung kawas ieu imah na saayana, ngahaja ngieun semi permanen teh watir Desa Sukamulya oge milu ka gusur, ngan ayeuna wae masih rada aman ku sabab masyarakatna ngotot haying cicing didieu. Kajeun pindah asalkeun syarat-syarat na dipenuhi ku pamarentah..."*

> *"...Sekarang saya punya rumah yang penitng bisa buat berteduh, disebabkan uang hasil menjual rumah tidak cukup untuk membangun rumah dengan kondisi yang minimal sama dengan sebelumnya. Coba bayangkan jika diperhitungkan tanah semakin turun, kalau dulu yang terjual seluas 30 bata sekarang dibelikan lagi untuk rumah di Sukamulya hanya cukup untuk 10 bata saja dengan kondisi seadanya. Sengaja dibuat semi permanen khawatir terkena penggususran lagi. Hanya sekarang merasa aman sebab masyarakatnya ngotot ingin tetap tinggal di Sukamulya. Boleh pindah asalkan syarat-syaratnya dipenuhi.*

Sebagaimana pernyataan di atas dapat disimpulkan jika petani merasa tidak memilki uang yang lebih dari hasil penjualan rumah dan tanah sebelumnya, justru mengalami kerugian dimana harga sebelum dan setelah adanya alih fungsi lahan yang mana petani pindah ke Desa Sukamulya yakni 3 : 1, dalam artian jumlah uang yang di dapat dari hasil menjual lahan dan rumah hanya cukup untuk membeli tanah yang 1/3 lebih kecil dibanding sebelumnya. Hal inilah yang mengakibatkan petani hanya mampu membangun rumah semi permanen dengan kondisi atap, lantai, dinding lebih buruk dibanding sebelumnya.

Lain halnya dengan kebutuhan primer dan sandang, meskipun untuk kebutuhan primer seperti frekuensi makan relatif terjadi penurunan namun berbeda dengan pemenuhan kebutuhan pakaian, meskipun nilai rata-rata rendah, beberapa ada yang merasa diuntungkan dengan adanya alih fumgsi lahan

sebagaimanan pernyataan yang disampaikan responden yakni Pak Rush (36) sebagai berikut.

> *"...Ayeuna mah mecak mimiti pindah ka Desa Sukamulya teh boga panghasilan leuwih, salain ti boga tanah nu ku urang di sewakeun beh menang untung ti pamarentah, salain ti eta oge bebenangan tina usaha the leuwih rame ayeuna ku lantara Desa Sukamulya mah leuwih makmur..."*

> *"...Sekarang enak pindah ke Desa Sukamulya punya penghasilan lebih, selain punya tanah yang disewakan agar dapat untung, selain itu juga penghasilan dari usaha kelontongan lebih rame dikarenakan Desa Sukamulya lebih makmur..."*

Dari pernyataan di atas adanya alih fungsi lahan justru lebih menguntungkan ia secara pribadi, selain karena usahanya yang lebih ramai pun tidak adanya suatu pungutan atau iuran untuk diberikan kepada pihak Desa dikarenakan ketidakaktifan petani tersebut dengan lingkungan masyarakat.

Selanjutnya inti pada bagian ini adalah tingkat pendapatan responden sebelum dan setelah adanya alih fungsi lahan, pada dasarnya pendapatan petani lebih bergantung pada jenis pekerjaan atau profesi yang dijalankan oleh petani itu sendiri. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh salah seorang petani pak Raden (47) ia mengatakan,

> *"...Urang ngarasa pendapatan turun teh ku sabab ti pamarentah teu tanggung jawab, kawas nyadiakeun tempat gawe atawa samacam pelatihan jang patani nu boga panghasilan tetap. Ku sabab ti eta lolobana patani nu tadina boga lahan ayeuna lahana jadi saeutik terus jadi buruh tani..."*

> *"...Saya merasa pendapatan turun dikarenakan dari pemerintah tidak bertanggung jawab, seperti menyediakan lapangan kerja atau semacam pelatihan buat petani yang tidak punya penghasilan tetap. Sebab banyak petani yang tadinya punya lahan sekarang lahannya sedikit yang pada akhirnya menjadi buruh..."*

Adanya pernyataan tersebut menandakan jika menurunnya pendapatan petani dikarenakan tidak adanya pendampingan dari pemerintah sehingga petani merasa dibiarkan sendiri untuk mencari pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup petani, yang mengakibatkan petani mengalami penurunan pendapatan.

Setelah adanya penjelasan dari masing-masing kategori berikut ini merupakan perbandingan kondisi ekonomi petani sebelum dan setelah adanya alih fungsi lahan adanya perbandingan ini akan menunjukkan sejauh mana tingkat perubahan kondisi ekonomi petani sebelum dan setelah alih fungsi lahan, dimana perubahan yang terjadi tidak seluruhnya mengalami penurunan, namun beberapa faktor diantaranya mengalami peningkatan dikarenakan beberapa hal. Menurun atau meningkatnya faktor ekonomi setelah adanya alih fungsi lahan bergantung pada kondisi lingkungan petani yang baru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

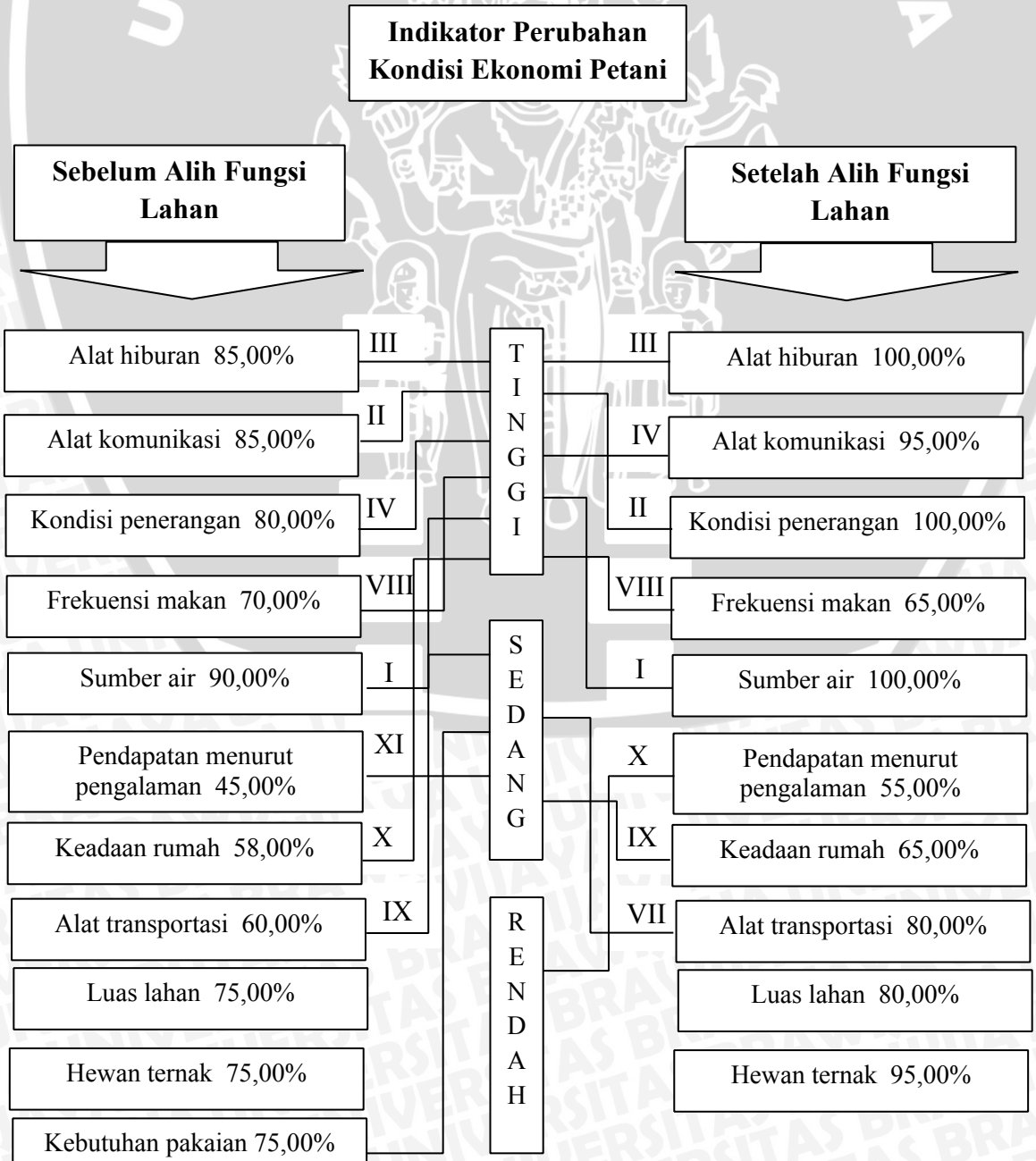

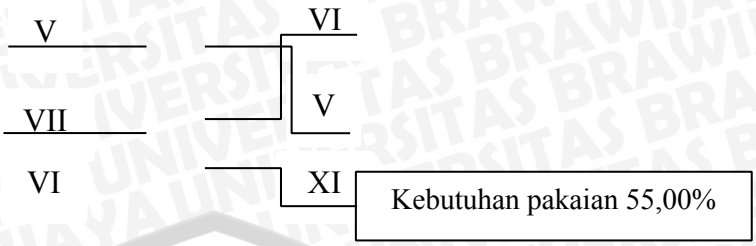

Gambar 5. Bagan indikator perbandingan kondisi ekonomi rumah tangga petani sebelum dan setelah alih fungsi lahan

Berdasarkan gambar bagan di atas menunjukkan adanya perubahan kondisi ekonomi sebelum dan setelah adanya alih fungsi lahan dimulai dari alat hiburan dan komunikasi yang justru menunjukkan peningkatan dari sebelum alih fungsi lahan sama 85% menjadi 100% dan 95%. Ini menujukkan tidak ada pengaruh berarti dari adanya alih fungsi lahan, berlanjut pada kondisi penerangan dan sumber air pun meningkat menjadi 100%, lain halnya dengan beberapa faktor lainnya justru lebih banyak mengalami penurunan, seperti keadaan rumah dari kondisi sebelum alih fungsi lahan masih ada 58% kondisi rumah dengan kategori sangat baik justru menurun pada saat setelah alih fungsi lahan menjadi 65% kategori sedang paling dominan, begitupun dengan frekuensi makan yang turun 5% dari awalnya 70% menjadi 65% tetap masih di kategori tinggi, pada kebutuhan pakaian pada awal 75% dominan pada kategori sedang, sedangkan setelah alih fungsi lahan justru dominan pada kategori rendah dengan 55%. Untuk alat transportasi terlihat jika memang ada peningkatan presentase, tapi sebenarnya jika dilihat ditabel terlihat penurunan sebesar 10% responden dengan kategori kepemilikan alat transportasi tinggi. Begitupun untuk kepemilikan hewan ternak dimana 75% kategori rendah pada saat sebelum alih fungsi menjadi 95% setelah alih fungsi. Untuk luas lahan, luasan lahan terendah menjadi bertambah dari sebelum 75% menjadi 80% begitupun dengan faktor terakhir yakni pendapatan menurut pengalaman dimana sebelum pendapatan dengan kategori tinggi paling dominan dengan 45%, justru berbalik menjadi pendapatan dengan kategori rendah sebesar 55%.

Setelah mengetahui pemaparan di atas dapat disimpulkan jika adanya alih fungsi lahan sangatlah mempengaruhi kondisi ekonomi petani, terlihat jika penurunan terjadi pada beberapa faktor sekalipun ada beberapa peningkatan juga

pada sebagian faktor. Tapi jika dikalkulasikan tetap penurunan kualitas ekonomi lebih banyak dibanding peningkatan.

6.3.3 Perbandingan Kondisi Budaya Rumah Tangga Petani Sebelum dan Sesudah Alih Fungsi Lahan

Pada bagian kondisi budaya rumah tangga petani yang merupakan salah satu kategori yang digunakan untuk dapat mengukur seberapa besar tingkat pengaruh dari adanya alih fungsi lahan. Dalam kondisi budaya ini bagaimanapun tidak dapat dipandang sebelah mata, dimana pelaksanaan kebudayaan bertani terkadang cukup memberikan pengaruh terhadap hasil bertani nantinya.

Kondisi budaya yang diukur ada 4 yakni dimulai dari rutinitas ibadah, dimana responden dilihat apakah memiliki keyakinan dan seberapa rutin ia dan keluarga beribadah. Lalu untuk penggunaan bahasa daerah pun ikut masuk dalam dalam pengukuran untuk mengetahui apakah ada perubahan atau tidak baik sebelum ataupun setelah adanya alih fungsi lahan.

Pada bagian ketiga merupakan salah satu faktor utama pengukuran pada bagian ini yakni budaya yang digunakan dalam bertani, ini dapat dilihat apakah responden melaksanakan budaya bertani yang biasa dilakukan di Desa Sukamulya baik sebelum ataupun setelah adanya alih fungsi lahan. Terakhir yakni adopsi inovasi dalam bertani dimana dapat kita ketahui apakah responden mendapatkan suatu inovasi bertani baru yang dapat diadopsi oleh responden sehingga dapat meningkatkan hasil produksi responden.

Dari masing-masing faktor yang dapat merubah kondisi budaya petani baik sebelum atau setelah alih fungsi lahan biasanya berjalan beriringan satu sama lain. Dimana budaya bertani dan bahasa daerah serta adopsi inovasi dalam pertanian bergantung pada kondisi tempat dimana mereka tinggal. Tidak jarang hal ini juga akan mempengaruhi pada rutinitas ibadah petani.

Tabel 31. Perbandingan Kondisi Budaya Rumah Tangga Petani Sebelum dan Setelah Alih Fungsi Lahan

No	Kondisi Budaya	Jumlah (orang)	Sebelum Alih Fungsi Lahan			Setelah Alih Fungsi Lahan			Rata - rata	Ranking
			R	S	T	R	S	T		
1	Rutinitas	20	-	15,00	85,00	-	40,00	60,00	72,5	II

	ibadah									
2	Penggunaan bahasa daerah	20	-	5,00	95,00	-	-	100,00	97,50	I
3	Budaya bertani	20	35,00	40,00	25,00	30,00	30,00	40,00	32,50	III
4	Adopsi inovasi	20	80,00	20,00	-	5,00	50,00	45,00	22,50	IV

Sumber: Analisis data primer, (2015)

Keterangan:

R : Kondisi budaya sebelum atau setelah adanya alih fungsi lahan lebih buruk
S :Kondisi budaya baik sebelum dan setelah adanya alih fungsi lahan tidak berpengaruh
T : Kondisi budaya lebih baik sebelum atau setelah adanya alih fungsi lahan

Dimulai dari rutinitas ibadah petani lebih karena dipengaruhi oleh individunya masing-masing meskipun memang beberapa diantaranya dipengaruhi oleh faktor pendapatan serta kondisi lingkungan masyarakat desa itu sendiri. Dimana data yang diperoleh petani yang kadang-kadang melaksanakan ibadah sebelum alih fungsi 15% berbanding 40%, sedangkan untuk petani yang rutin melaksanakan ibadah mengalami penurunan dari 85% menjadi hanya 60%. Dari hasil wawancara pada Pak Nono (54) beberapa mengatakan,

> *"...Ari ibadah mah seseringna kadang-kadang lamun keur sibuk nya poho ka ibadah da inget ka duit bae, tapi lamun keur boga duit loba namah nya rada sering ibadahna, beda lamun keur teu boga duit nya poho pisan ka ibadah teh. Ari kondisi ayeuna mimiti pindah terus lahannya ka gusur rada jarang ibadah teh, ku lantaran loba sasadu ka pamarentah..."*

> *"...Jika ibadah seringnya kadang-kadang kalo lagi sibuk ya lupa ke ibadah karena ingat ke uang saja, tapi kalo lagi punya uang biasanya sering ibadah, beda kalo lagi tidak punya uang ya lupa banget ke ibadahnya. Kalo kondisi sekarang dimulai pindah terus lahannya ke gusur agak jarang ibadah, karena banyak kecewa sama pemerintah..."*

Adanya pernyataan petani tersebut menguatkan jika menurunnya pendapatan petani cukup berpengaruh terhadap rutinitas ibadah petani terlihat dari persentase yang ada mengalami penurunan sebesar 15%.

Untuk intensitas penggunaan bahasa daerah petani terlihat tidak terlalu ada perubahan yang cukup signifikan. Dimana petani yang menggunakan bahasa daerah hanya karena jika diperlukan sebesar 5% sebelum dan setelah adanya alih fungsi lahan tidak ada sama sekali atau 0%, sedangkan petani yang kadang-kadang menggunakan bahasa daerah yakni bahasa Sunda hanya sebesar 5% untuk setelah alih fungsi lahan dengan perbandingan sebelumnya 0%, hal ini dikarenakan petani tersebut merupakan petani pindahan yang tadinya berasal dari jawa dengan bahasa jawa *"ngapak"* yang khas dipadukan dengan bahasa sunda. Sedangkan sisanya baik sebelum maupun setelah adanya alih fungsi lahan sebesar 95% merupakan petani yang berasal dari daerah Desa tetangga, sehingga adanya alih fungsi lahan tidak terlalu berpengaruh terhadap penggunaan bahasa daerah atau Sunda, karena Desa Sukamulya pun mayoritas menggunakan bahasa Sunda.

Selanjutnya berkenaan dengan budaya bertani dapat disimpulkan jika pelaksanaan budaya dalam bertani terlihat tidak terlalu berpengaruh seiring dengan adanya alih fungsi lahan, dimana perbandingan pelaksanaan budaya bertani memang terlihat jika petani cenderung lebih sering melaksanakan budaya bertani.

Perbandingan pelaksanaan budaya bertani sebelum adanya alih fungsi lahan petani yang jika diperlukan memperoleh persentase 35%, 40% petani kadang-kadang melaksanakan kebudayaan bertani bergantung pada perolehan pendapatan, serta 25% sisanya petani yang relatif sering melaksanakan praktik budaya dalam bertani. Berbeda dengan hasil setelah adanya alih fungsi lahan, perbedaan terjadi pada semua kategori. Akan tetapi perbedaan yang cukup dominan terjadi pada petani yang relatif sering melaksanakan praktik budaya dimana memperoleh 40%, diikuti oleh petani yang relatif kadang-kadang dan jika diperlukan dimana masing-masing mendapat 30%.

Perbedaan sebelum dan setelah adanya alih fungsi lahan jika kita melihat berdasarkan data di atas dan kondisi real di lapangan dikarenakan petani yang bukan warga asli Desa Sukamulya namun kini menetap. Justru menjadi sering melaksanakan praktik budaya bertani. Berikut pelaksanaan budaya yang ada di Desa sukamulya ada 3 yakni:

1. Gaur Bumi : Praktik budaya yang dilakukan sebelum mengolah lahan yang akan ditanami
2. Munjungan : Praktik buda berupa kirim do'a setelah penanaman dilakukan dengan harapan agar pada prosesnya tidak terserang oleh berbagai macam masalah.
3. Mapag Sri : Praktik budaya yang dilakukan sebelum panen, dengan harapan hasil yang diperoleh dapat maksimal.

Untuk petani yang kadang-kadang atau jika diperlukan lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan letaknya yang jauh dari pusat Desa.

Terakhir yakni adopsi inovasi tata cara bertani petani dalam mengelola lahan pertanian. Jika kita mengacu pada tabel terlihat adanya suatu intensitas yang lebih sering setelah adanya alih fungsi lahan. Petani sebelum adanya alih fungsi lahan dengan persentase sebasar 80% berbanding 5%, perbedaan ini dikarenakan petani pada saat sebelum adanya alih fungsi lahan berada di desa yang relatif kurang baik dalam penggunaan alat pertanian sehingga petani hanya pada waktu tertentu saja atau saat dibutuhkan digunakanlah alat tersebut selain itu faktor tidak aktifnya kelompok tani mempengaruhi pengetahuan petani tentang adopsi inovasi petani. Dan 0% petani sebelum adanya alih fungsi lahan merasa tidak ada adopsi inovasi dalam tata cara bertani, sedangkan setelah adanya alih fungsi lahan langsung meningkat menjadi 5%.

Berbeda dengan kriteria ketiga dimana petani kadang-kadang melakukan suatu inovasi dalam bertani sebesar 20% berbanding 50%. Perbedaan yang cukup signifikan ini dikarenakan faktor kelompok tani yang ada di Desa Sukamulya cukup aktif. Dari pemaparan keempat kategori di atas dapat digambarkan perbandingan kondisi budaya sebelum dan setelah alih fungsi lahan sebagai berikut:

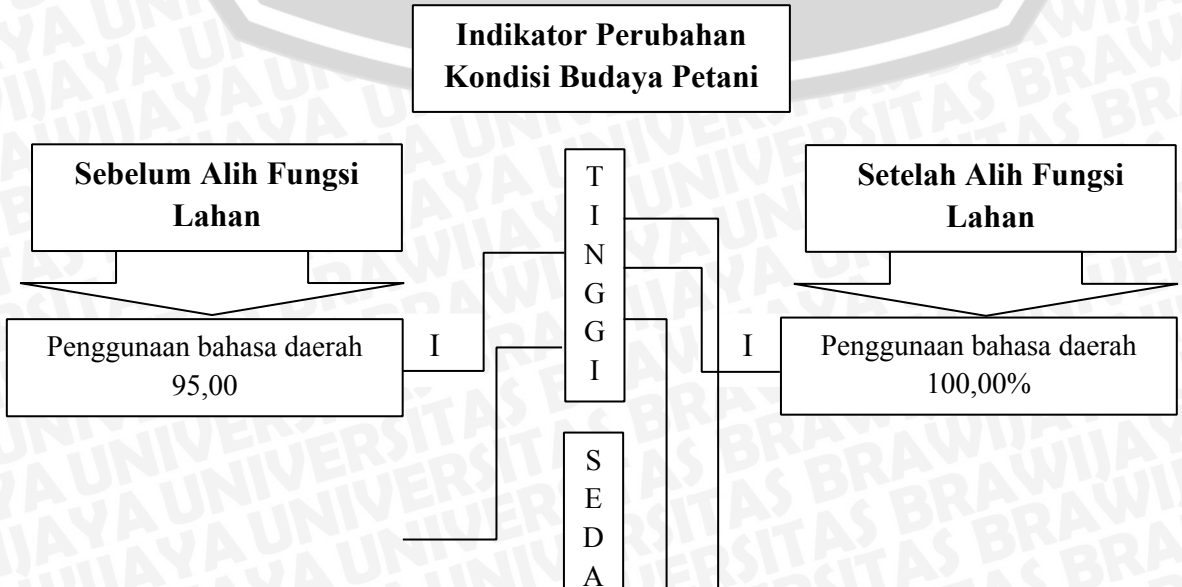

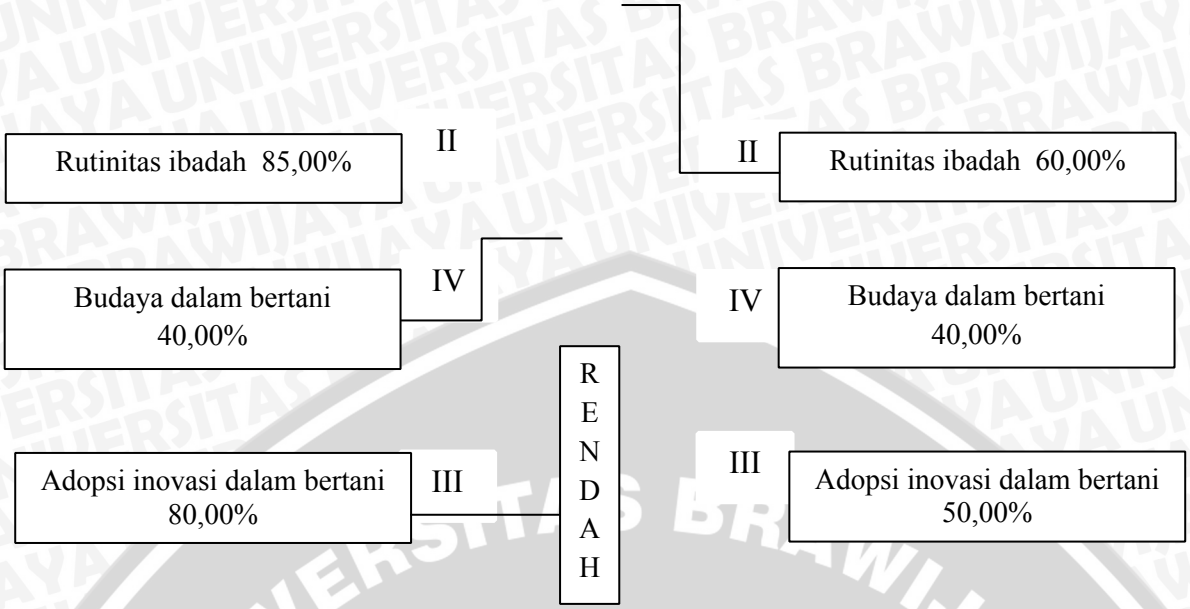

Gambar 6. Bagan indikator perbandingan kondisi budaya rumah tangga petani sebelum dan setelah alih fungsi lahan

Berdasarkan bagan indikator perbandingan kondisi budaya di atas menunjukkan jika ada perbedaan antara sebelum dan setelah sekalipun tidak secara signifikan. Dimulai dari rutinitas ibadah yang mengalami penurunan dari yang tadinya tinggi 85% menjadi 65%, berbeda dengan 3 faktor lainnya yang cenderung mengalami peningkatan seperti penggunaan bahas daerah dari 95% menjadi 100%, lalu ada budaya bertani dari 40% paling dominan sebelum alih fungsi lahan termasuk kategori sedang menjadi 40% kategori tinggi setelah alih fungsi lahan. terakhir ada adopsi inovasi dalam bertani yang meningkat drastis, dari 80% termasuk rendah sebelum alih fungsi lahan menjadi 45% kategori tinggi setelah alih fungsi lahan. Peningkatan ini semua tidak lepas dari kondisi masyarakat Desa Sukamulya yang cukup baik menjalankan kebudayaan yang sudah ada semenjak dulu. Bisa berbeda jadinya ketika masyarakat yang terkena alih fungsi lahan berpindah ke desa lain yang relatif secara kebudayaan tidak kompak dalam melaksanakan adat istiadat yang ada di daerahnya masing-masing.

Dengan demikian setelah diketahui perbandingan akibat dampak dari alih fungsi lahan terhadap kondisi sosial ekonomi dan budaya petani sebelum dan setelah alih fungsi lahan, perlu kiranya memberikan suatu gambaran kesimpulan diantara kesemuanya dimana dengan adanya perbandingan tersebut dapat diketahui presentase pengaruh secara keseluruhan terhadap dampak dari adanya

alih fungsi lahan. Seiring dengan adanya faktor yang mengalami peningkatan dan penurunan setelah adanya alih fungsi lahan.

Setelah diketahui besaran pengaruh faktor kondisi sosial ekonomi dan budaya yang diakibatkan oleh adanya alih fungsi lahan, akan dapat dijadikan sebagai suatu ukuran faktor-faktor mana saja yang perlu mendapatkan perhatian lebih dan perlu dilakukan perbaikan segera, karena bagaimanapun adanya pengaruh setelah alih fungsi lahan terhadap kondisi sosial ekonomi dan budaya petani akan sangat berdampak pada psikologis masyarakat nantinya.

Berikut ini merupakan bagan tingkat pengaruh dari dampak alih fungsi lahan terhadap kondisi sosial ekonomi dan budaya petani.

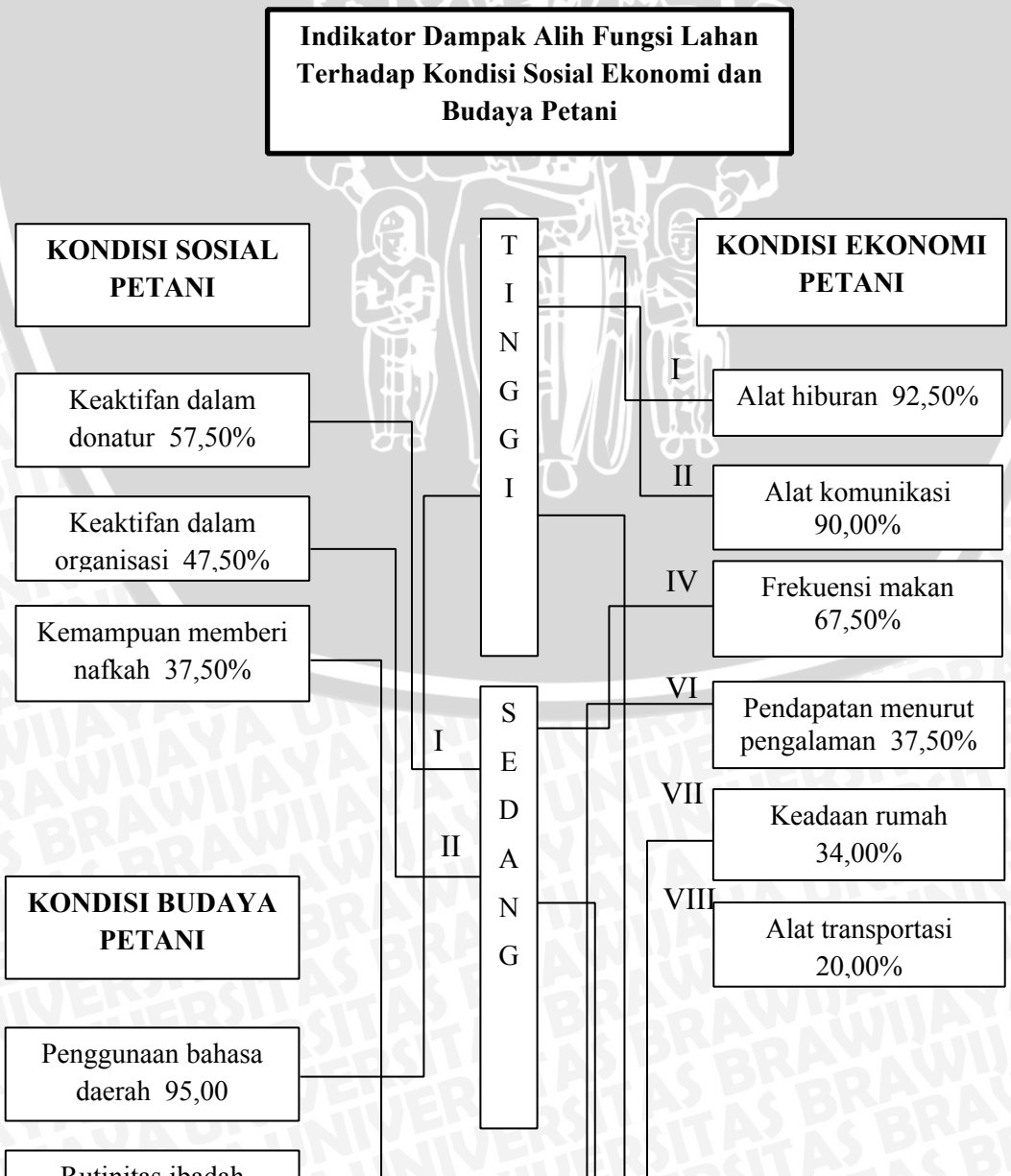

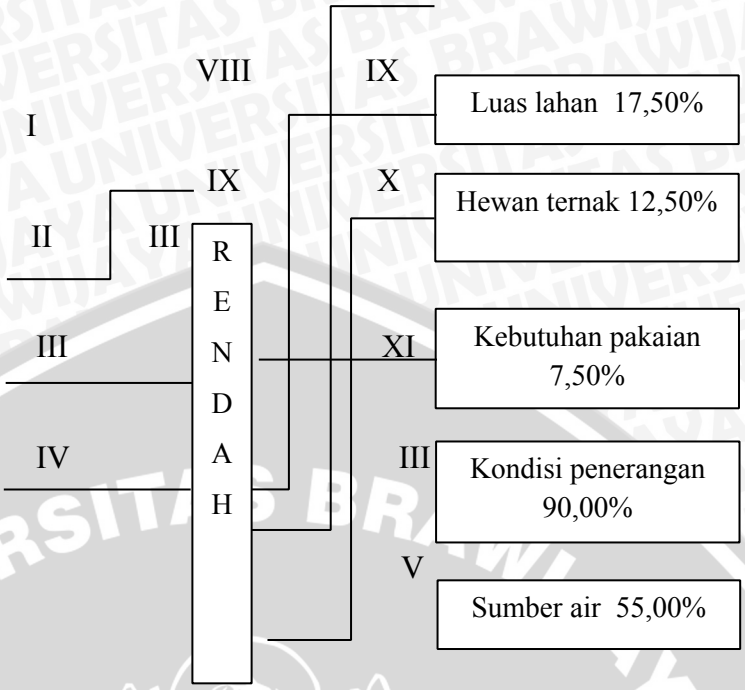

Gambar 7. Bagan tingkat pengaruh kondisi sosial, ekonomi dan budaya terhadap dampak alih fungsi lahan sebelum dan setelah alih fungsi lahan

Berdasarakan data keseluruhan yang dilampirkan pada gambar di atas dapat dilihat tingkat pengaruh dari ketiga kondisi yakni, kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi budaya rumah tangga petani. Dapat disimpulkan jika banyak kegiatan dan juga kepemilikan petani yang berada dalam kategori rendah ini berarti tingkat pengaruh dari adanya alih fungsi lahan cukup memberi dampak yang besar. Hanya ada 3 kategori yang masuk dalam presentase tinggi yakni 2 dari penilaian secara kondisi ekonomi alat hiburan 92,5%, alat komunikasi 90% dan kondisi penerangan 90% serta 1 dari kondisi budaya petani yakni penggunaan bahasa daerah 95%. Ketiga ini mendapat presentase yang tinggi berarti tidak cukup berpengaruh meskipun ada alih fungsi lahan.

Pada presentase yang termasuk dalam hitungan sedang ada 4 kategori yang masing-masing kondisi ikut termasuk. Ada rutinitas ibadah 72,5%, frekuensi makan 67,5%, keaktifan dalam donatur 57,5% dan terakhir keaktifan dalam organisasi 47,5%. Kategori yang terdapat pada hitungan sedang ini relatif cukup memberikan pengaruh meski tidak besar, karena ada beberapa kategori justru lebih baik dibanding sebelum adanya alih fungsi lahan dikarenakan Desa

Sukamulya lebih bisa mengayomi masyarakat lainnya sehingga dapat ikut berperan aktif di masyarakatnya baik secara sosial maupun budaya.

Pada bagian terakhir termasuk dalam penilaian rendah dengan tingkat pengaruh tinggi seiring dengan adanya alih fungsi lahan ada cukup banyak bahkan jika ditotal dari keseluruhan lebih dari 50% termasuk dalam penilaian rendah diantaranya adalah: kemampuan memberi nafkah 37,5%, pendapatan menurut pengalaman 37,5%, keadaan rumah 34%, alat transportasi 20%, luas lahan 17,5%, kepemilikan hewan ternak 12,5%, kebutuhan pakaian 7,5%, budaya dalam bertani, 32,5%, serta adopsi inovasi dalam bertani sebesar 22,5%. Kategori-ketegori inilah yang membuat kualitas hidup responden menurun setelah adanya alih fumgsi lahan. penurunan cukup besar dan perlu diperbaiki adalah kemampuan memberi nafkah, keadaan rumah, luas lahan dan kebutuhan pakaian.

Dari pemaparan di atas terlihat jelas adanya penurunan kualitas hidup terutama kondisi ekonomi responden jika dibuat presentase total masih dalam tahap aman atau tinggi hanya 18,7% (3 kategori), sedangkan sedang 25% (4 kategori) dan rendah sebanyak 56,25% (9 kategori).

6.4 Hubungan Proses Adaptasi Mata Pencaharian Masyarakat Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Petani Setelah Alih Fungsi Lahan

Proses adaptasi mata pencaharian masyarakat terhadap kondisi sosial ekonomi dan budaya merupakan salah satu akibat dari adanya suatu perubahan pada lingkungan sebelumnya sehingga berakibat pada perlunya proses adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat agar dapat menyesuaikan dengan lingkungan baru serta dapat mempertahankan bahkan justru meningkatkan kualitas hidup keluarganya dibanding sebelumnya.

Adanya alih fungsi lahan yang terjadi di Desa Sukamulya merupakan suatu masalah bagi masyarakat yang tinggal disana khususnya para petani yang terlibat dan terkena imbas dari adanya alih fungsi lahan berupa berkurangnya luas lahan, dan terjadinya penurunan pada beberapa aspek khususnya peluang atau kesempatan kerja masyarakat yang dapat berubah seiring dengan berpindahnya tempat ke lingkungan yang baru. Alih fungsi lahan yang terjadi di Desa Sukamulya tidak dapat dihindari karena memang adanya tuntutan pembangunan khususnya sarana dan prasarana transportasi demi menunjang kelancaran proses

perekonomian yang secara kasat mata akan cukup membantu pemerintah namun di sisi lain justru membuat masyarakat semakin menderita.

Proses adaptasi masyarakat dari lingkungan sebelumnya ke lingkungan yang baru tidak semata-mata langsung berpindah dengan mudah namun, ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi petani dalam beradaptasi terhadap lingkungan yang baru khususnya perubahan mata pencaharian. Selain itu, ada faktor pendapatan, sarana dan prasarana,dan kesempatan kerja. Dimulai dari faktor pendapatan yang kemungkinan akan terjadi penurunan seiring dengan berubahnya mata pencaharian. Sarana dan prasarana pun akan mempengaruhi terhadap kemampuan masyarakat dalam mengerjakan suatu pekerjaannya, dengan berpindahnya lingkungan dan adaptasi lingkungan yang baru otomatis akan nada pengurangan sarana dan prasarana yang diperoleh oleh masyarakat. Begitupun dengan kesempatan kerja akan semakin minim karena pemerintah tidak menyediakan alternatif setelah adanya alih fungsi lahan, masyarakat hanya memperoleh ganti rugi lahan dan bangunan ini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan mata pencaharian diantaranya:

1. Perubahan Mata Pencaharian

Hal utama yang disoroti dari adanya alih fungsi lahan adalah akan terjadinya perubahan mata pencaharian, terlihat jelas pada bab sebelumnya telah digambarkan dengan jelas perbandingan pekerjaan sebelum dan setelah adanya alih fungsi lahan. Dimana ada beberapa yang mengalami perubahan mata pencaharian. Dari total 20 responden ada 5 responden yang berubah profesi, meskipun masih sama pekerjaannya tapi secara tingkatan menurun yakni dari petani menjadi buruh tani. Dilihat dari permasalahan yang di alami petani dalam adaptasi terhadap pekerjaan yang baru, berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dengan bapak Nahya (50)

> *"...Aya na alih fungsi lahan teh nyebabkeun petani hese neangan pagawean nu sarua di bidang pertanian, soalna pamarentah teu mere arahan keur gawe kaharep. Jadi loloba namah gawe deui ngan nu tadi na patani jadi buburuh..."*

> *"...Adanya alih fungsi lahan menyebabkan petani kesulitan mencari pekerjaan yang sama di bidang pertanian, soalnya pemerintah tidak memberikan arahan buat kedepannya. Jadi banyak yang bekerja selain jadi buruh tani..."*

Berdasarkan pernyataan di atas beliau menyatakan jika adanya alih fungsi lahan mengubah pekerjaan petani yang tadinya petani biasa menjadi buruh tani. Tidak beralihnya profesi dari pertanian dikarenakan petani tidak memiliki keahlian lebih selain di bidang pertanian. Selain itu, buruh tani yang ada di Desa Sukamulya mendapat imbalan yang cukup besar yakni sebesar Rp. 75.000 per ½ hari, secara otomatis masyarakat mencari pekerjaan cukup sebagai buruh tani saja.

2. Tingkat Pendapatan

Terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat bergantung pada pendapatan yang diperolehnya. Dengan adanya alih fungsi lahan di Desa Sukamulya mengakibatkan beberapa masyarakat mengalami penurunan pendapatan. Akan tetapi, tidak sedikit juga masyarakat yang berasal dari Desa lain mengalami peningkatan pendapatan.

Perlu diketahui dari beberapa desa yang tergusur akibat adanya alih fungsi lahan, Sukamulya merupakan salah satu desa dengan tingkat kesuburan dan pengasilan dari pertanian tertinggi di Kecamatan Kertajati seperti yang disampaikan oleh Rush (36).

> *"...Yeuh a, lamun rek nyaho mah Desa Sukamulya the pang suburna, salain eta masyarakana oge pang kompakna. Lamun nyaho hasil ti pertanian the bisa nyampe 20M/bulan perputaran uangnya. Jadi wajar lamun buruh tani meunang upah Rp.75.000 per ½ hari na. ayeuna urang bae nu baheula na cicing di desa tatangga ngawarung pindah ka sukamulya the kalah ka meunang untung gede, ku sabab naon? Lantaran tempatnya leuwih strategis jeung deket ka sawah. Bensin wae urang jual ngecer bisa sampe seep Rp. 2.000.000 per poe na. tapi inget a lamun harga tanah mah mahal di dieu kapokoh urang boga tanah kolot the tempo imah mah beuki goreng. Lamun nempo nu masyarakat sejen nu pindah ka sukamulya salain ti urang nya loloba na mah beuki nurun pendpatana lantaran teu baroga tanah deui, duit nang ngajual imah jeung tanah ngan sa ukur mahi meuli tanah sareng ngabangun bumi semi permanen bae..."*

> *"...Nih a, kalau ingin tahu Desa Sukamulya itu paling subur, selain itu masyarakatnya kompak, kalau tahu hasil pertaniannya bisa mencapai 20M/bulan perputaran uangnya. Jadi wajar kalau buruh tani dapat upah Rp.75.000 per ½ harinya. Sekarang saya saja yang dulu tinggal di desa tetangga buka warung pindah ke*

Sukamulya justru dapat untung besar. Sebab tempatanya lebih strategis deket sawah. Bensin saja saya jual eceran bisa sampai Rp.2.000.000 per harinya. Tapi inget kalau harga tanah disini mahal, rumah makin jelek. Jika lihat masyarakat lain pindah ke Sukamulya justru semakin rendah pendapatannya dikarenakan tidak punya tanah lagi. Uang hasil menjual rumah hanya cukup untuk membangun rumah semi permanen…"

Dari pernyataan di atas pada intinya masyarakat khususnya petani yang terkena dampak alih fungsi lahan ada yang rugi namun ada juga yang untung tergantung bagaimana petani tersebut mengalokasikan dananya. Tapi, pada dasarnya banyak petani yang mangalami kerugian karena kondisi dan perlunya adaptasi yang cukup lama untuk memulai kembali membangun pekerjaan barunya sekalipun itu sebagai petani. Beberapa petani dapat memanfaatkan lingkungan barunya namun petani yang lainnya masih belum dapat, yang diutamakan adalah membangun rumah kembali, baru setelah itu kembali mencari sumber pendapatan lain.

3. Sarana dan Prasarana

Adanya alih fungsi lahan berpengaruh pada sarana dan prasarana petani dalam bercocok tanam. Jelaslah dengan adanya alih fungsi lahan semakin menurunkan sarana pertanian yang kian memudar seiring dengan semakin berkurangnya garapan lahan pertanian. Akan tetapi, Desa Sukamulya merupakan desa dengan peralatan bertani yang cukup lengkap dan modern, petani yang pindah dari desa lain memang fokus dalam membangun rumah kembali tapi dalam hal bertani ia mendapatkan bagian untuk menggunakan alat pertanian tersebut melalui kelompok-kelompok tani yang ada di Desa Sukamulya.

Lain halnya dengan perangkat desa seperti jalan serta fasilitas umum lainnya yang sudah tidak menjadi perhatian pemerintah daerah. Karena tetap menjadi proyek untuk penggusuran sehingga pemerintah merasa tidak perlu untuk melakukan perbaikan fasilitas umum.

4. Kesempatan Kerja

Tempat baru, masyarakat baru, adaptasi yang tinggi, serta hal lainnya yang mempengaruhi pada tersedianya kesempatan kerja. Dilihat dari masyarakat yang

berpindah ke Desa Sukamulya banyak diantaranya masyarakat yang berprofesi sebagai petani, dan setelah pindah pun masyarakat tetap berprofesi sebagai petani. Jika dilihat data dari 20 responden yang ada nampak tidak adanya perubahan dalam hal kesempatan kerja. Karena masih tetap sama berprofesi sebagai patani. Jika dikatanan kesempatan kerja menurun, ya. Karena dari 20 responden ada yang beralih profesi dikarenakan tidak adanya lahan garapannya sehingga hanya memperoleh penghasilan sebagai buruh tani saja. Adapun untuk kesempatan kerja lainnya dalam hal buruh tani relatif lebih banyak karena di Desa Sukamulya membutuhkan banyak buruh tani untuk dapat menggarap lahan yang dimiliki oleh tuan tanah besar. Berbeda dengan masyarakat yang memiliki pekerjaan rangkap atau "nyambi" seperti buruh tani dan pedagang keliling seperti dikatakan oleh Bapak Said (40)

> *"...Ari kanggo buburuh mah di Desa Sukamulya the leuwih babari jeung upah na oge gede, tapi lamun jalma kawas urang nu sawaktu-waktu buburuh terus sesana jualan keliling rada hese, butuh adaptasi soalnya beda pasar jeung beda tempatnya, langgan-langgan nu biasa meuli kan teu aya jadi nya kudu neangan langgan deui..."*

> *"...Jika buat upah di Desa Sukamulya lebih mudah dan besar, tapi kalau orang seperti saya yang sewaktu-waktu menjadi buruh dan jualan keliling terkadang susah, butuh adaptasi soalnya beda pasar sama tempatnya, pelanggan yang biasa beli tidak ada dan kita perlu mencari pelanggan baru..."*

Berdasarkan pernyataan di atas untuk kesempatan kerja sebagai buruh tani cukup terbuka lebar, tapi bagi masyarakat yang profesi buruh taninya sebagai sampingan dan sisanya dihabiskan untuk jualan keliling atau buka toko klontongan, sedikit lebih sulit karena perlu mencari pangsa pasar baru dan pelanggan baru seiring dengan tidak adanya pelanggan-pelanggan yang biasa membeli pada saat ia belum pindah, hal ini yang mengakibatkan bapak Said mengeluh karena kesulitan tersebut. Ia merasa jika di tempat sebelumnya tetap dirasa lebih mudah untuk berjualan.

Setelah adanya alih fungsi lahan responden mengharapkan adanya suatu kemudahan yang diperoleh dari pemerintah setelah adanya alih fungsi lahan berupa kemudahan dalam memperoleh profesi yang baru, responden masih

mengharapkan bekerja sebagai petani karena penghasilan sebagai buruh tani mereka rasa sudah cukup untuk dapat menghidupi keluarganya sehari-hari. Selain itu jika memang ada pekerjaan lain mereka mengharapkan memperoleh pekerjaan dengan minimal kondisi lingkungan yang sama dengan Sukamulya agar proses adaptasi tidak memerlukan waktu yang cukup lama.

Dengan demikian setelah diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mata pencaharian dapat kita ketahui juga hubungan antara kondisi sosial ekonomi dan budaya petani terhadap perubahan mata pencaharian petani setelah alih fungsi lahan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai Rank Spearman dimana perubahan mata pencaharian petani setelah alih fungsi lahan.Untuk menegetahui lebih jelas hubungan variabel X dengan perubahan mata pencaharian petani setelah alih fungsi lahan. Berikut ini merupakan tabel hubungan kondisi sosial ekonomi dan budaya petani terhadap perubahan mata pencaharian petani setelah alih fungsi lahan.

Tabel 32. Hubungan Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Petani Terhadap Perubahan Mata Pencaharian Setelah Alih Fungsi Lahan

No	Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Petani Setelah Alih Fungsi Lahan	Jumlah (orang)	Perubahan Mata Pencaharian (%)			rs_{hitung}
			R	S	T	
1.	Kondisi Sosial	20				0,30
	a. Kemampuan memberi nafkah	20	50,00	15,00	35,00	0,67**
	b. Keaktifan dalam organisasi	20	20,00	20,00	60,00	0,43
	c. Keaktifan dalam donator	20	10,00	25,00	65,00	0,72**
2.	Kondisi Ekonomi	20				0,19**
	a. Luas lahan	20	80,00	5,00	15,00	0,63**
	b. Hewan ternak	20	95,00	-	5,00	0,61**
	c. Alat transportasi	20	5,00	80,00	15,00	0,49*
	d. Alat komunikasi	20	5,00	-	95,00	0,87**
	e. Keadaan rumah	20	15,00	65,00	10,00	0,53*
	f. Kondisi penerangan	20	-	-	100,00	-
	g. Sumber air	20	-	-	100,00	-
	h. Alat hiburan	20	-	5,00	95,00	0,67**

	i. Frekuensi makan	20	-	35,00	65,00	0,39
	j. Kebutuhan pakaian	20	55,00	30,00	15,00	0,65**
	k. Pendapatan menurut pengalaman	20	55,00	5,00	40,00	0,68**
3. Kondisi Budaya		20				0,32**
	a. Rutinitas ibadah	20	-	40,00	60,00	0,47*
	b. Penggunaan bahasa daerah	20	-	-	100,00	-
	c. Budaya dalam bertani	20	30,00	30,00	40,00	0,45*
	d. Adopsi inovasi dalam bertani	20	5,00	50,00	45,00	0,61**
Kondisi Sosial Ekonomi Budaya		20				0,76**

Sumber: Analisis data primer, 2015 (diolah)

* = Terdapat hubungan dengan tingkat signifikansi pada $R_{s0,05}$
** = Terdapat hubungan dengan tingkat signifikansi pada $R_{s0,01}$
R = Tidak mempengaruhi perubahan mata pencaharian
S = Kurang mempengaruhi perubahan mata pencaharian
T = Sangat mempengaruhi perubahan mata pencaharian

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pada masing-masing kondisi baik sosial, ekonomi dan budaya terdapat hubungan dengan tingkat signifikansi yang berbeda baik $R_{s0,05}$ atau $R_{s0,01}$. Pada kondisi sosial petani setelah alih fungsi lahan terdapat hubungan antara kemampuan petani dalam menafkahi anggota keluarganya setelah alih fungsi lahan dengan perubahan mata pencaharian dan keaktifan dalam donatur berurutan berada pada tingkat signifikansi 0,67 dan 0,76 berada pada $R_{s0,05}$ yang artinya memiliki hubungan cukup kuat dimana apabila kemampuan memberi nafkah anggota kelurga semakin tinggi maka dapat mempengaruhi perubahan mata pencaharian.

Selanjutnya pada kondisi ekonomi petani justru cukup banyak variabel X yang berhubungan terhadap perubahan mata pencaharian diantaranya terjadi pada luas lahan dengan nilai probabilitas $R_{s0,01}$ dimana nilai koefisien korelasinya sebesar 0,63 begitupun dengan kebutuhan pakaian dan pendapatan menurut pangalaman secara berurutan koefisien korelasinya adalah 0,65 dan 0,69, terakhir ada kepemilikan hewan ternak 0,61 dan alat komunikasi 0,87, artinya faktor-faktor tersebut memberikan pengaruh terhadap perubahan mata pencaharian setelah alih fungsi lahan dengan tingkat kepercayaan 99%. Berbeda dengan kondisi ekonomi yang berkaitan dimana alat transportasi dan keadaan rumah

petani memiliki nilai probabilitas $R_{s0,05}$ dengan nilai koefisien korelasinya secara berurutan masing-masing memiliki tingkat hubungan sebesar 0,49 dan 0,53. Adanya hubungan antara kedua variebel tersebut menunjukkan jika aset seperti rumah dan kepemilikan alat transportasi dapat dijadikan pertimbangan bagi petani untuk beralih profesi dan mencari mata pencaharian baru.

Terakhir untuk hubungan kondisi budaya petani dengan perubahan mata pencaharian petani adopsi inovasi petani memiliki tingkat kepercayaan 99% signifikansi $R_{S0,01}$ dengan analisis korelasinya 0,61 dan budaya dalam bertani dengan $R_{S0,05}$ signifikansi 0,45. Ini berarti adopsi inovasi memiliki hubungan keterikatan kuat dengan perubahan mata pencaharian petani. Sehingga diperlukan adanya adopsi inovasi bertani untuk lebih membuat suatu variasi dalam mata pencaharian. Berikut ini merupakan bagan ketiga kondisi berdasarkan tingkat perubahannya.

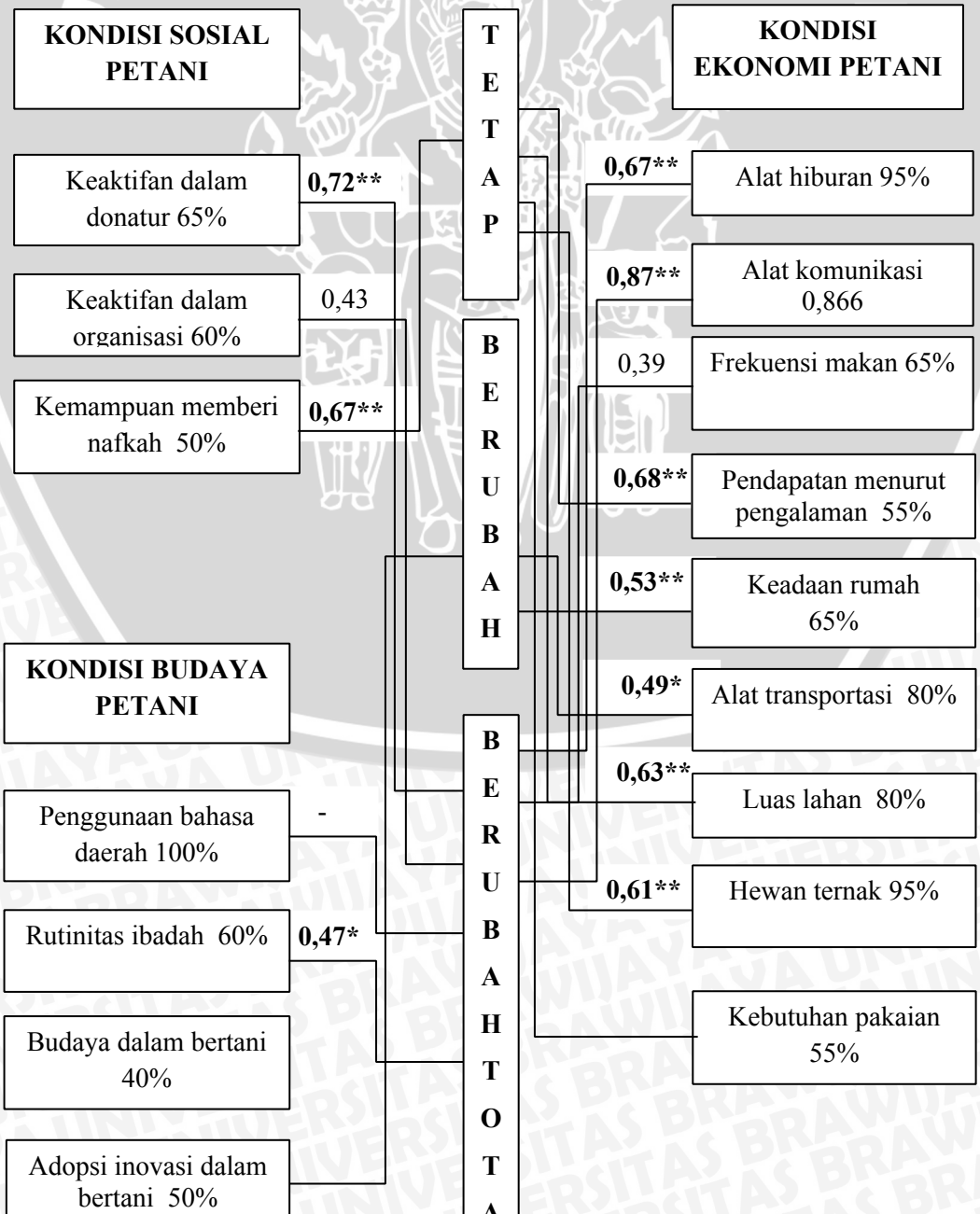

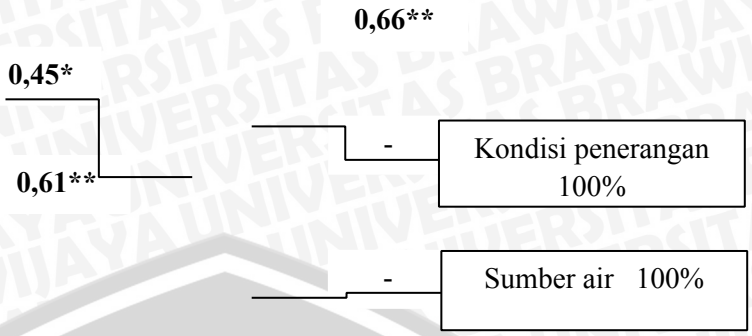

Gambar 8. Bagan hubungan kondisi SOSEKBUD petani terhadap perubahan mata pencaharian setelah alih fungsi lahan

Jika dilihat berdasarkan bagan di atasyang dibagi ke dalam 3 bagian utama dimana di setiap bagian tersebut ada arah kecenderungan jika faktor tersebut lebih di dominan diantara salah satu dari tiga perubahan yang ada. Dimulai dari kategori tetap yang artinya tidak ada perubahan mata pecaharian responden baik setelah adanya alih fungsi lahan, yang berarti faktor-faktor yang memiliki kecenderungan di dalamnya dimulai dari kondisi sosial petani ada kemampuan petani memberi nafkah dengan presentase sebesar 50% degan tingkat signifikansi (0,67**) dimana petani tetap ini bertahan dengan mata pencaharian sebelum alih fungsi lahan. Selanjutnya dilihat dari kondisi ekonomi petani setelah alih fungsi lahan terhadap perubahan mata pencaharian petani setelah alih fungsi lahan, faktor dominan ada luas lahan dan kepemilikan hewan ternak dengan presentase masing-masing 80% dengan signifikansi (0,63**) dan 95%, lalu ada kebutuhan pakaian dan pendapatan sama dengan presentase sama sebesar 55% dan signifikansi secara berurut (0,65**) dan (0,68**). Sedangkan untuk kondisi budaya petani tidak ada kecenderungan memberikan pengaruh untuk tetap berprofesi sebagai petani.

Pada kategori kedua yakni berubah dalam arti ada penambahan profesi sampingan selain daripada profesi utama sebagai petani, dimana ada 3 faktor yang memiliki kecenderungan diantaranya pada kondisi ekonomi ada kepemilikan alat transportasi dan keadaan rumah setelah alih fungsi lahan dengan presentase dan tingkat signifikansi masing-masing adalah 80% dan (0,49*), 65% dan (0,529). Sedangkan faktor lainnya terdapat pada faktor budaya dalam hal adopsi inovasi dalam bertani sebesar 50% dengan signifikansi (0,61**). Petani yang termasuk

pada kategori ini ada keinginan untuk menambah kemampuan ekonomi dan lainnya sehingga perlu peningkatan di beberapa sektor.

Untuk kategori terakhir yakni berubah total dimana responden tidak ada lagi yang bekerja sebagai petani ataupun ada keterikatan dalam hal pertanian. Ada cukup banyak faktor yang cukup mendorong untuk berubah diantaranya ada keaktifan dalam organisai dan keaktifan dalam donatur dengan presentase masing-masing 60% dan 65%. Lalu untuk faktor kondisi ekonomi ada alat komunikasi dengan presentase yang cukup besar yakni 95%, sumber penerangan dan sumber air dengan presentase sempurna 100% serta kepemilikan alat hiburan dan frekuensi makan dengan presentase masing-masing sebesar 95% dan 65%. Terakhir pada kondisi budaya hampir semua faktor cenderung mengarah pada perubahan pekerjaan total terkecuali adopsi inovasi dalam bertani. Untuk rutinitas ibadah 60%, penggunaan bahasa daerah 100% dan budaya dalam bertani sebesar 40%. Dimana diantara semua faktor yang ada tidak terlalu signifikan.

6.5 Hubungan Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Petani dengan Tingkat Kesejahteraan Petani Setelah Alih Fungsi Lahan

Kondisi sosial ekonomi dan budaya petani seperti sudah di paparkan pada halaman sebelumnya merupakan suatu kondisi dimana masyarakat mengalami perubahan kualitas hidup setelah adanya alih fungsi lahan, dimana hal ini dipengaruhi oleh menurunnya kondisi sosial ekonomi dan budaya petani. Adanya alih fungsi lahan sangat berdampak pada ketiga kondisi tersebut. Seiring berjalannya waktu petani akan mulai merasakan jika dampak alih fungsi lahan sangatlah mempengaruhi kualitas hidup mereka dimasa mendatang.

Kondisi sosial ekonomi dan budaya petani sejatinya menjadi suatu perhatian bagi pemerintah seiring dengan adanya pembangunan bandara, karena ketika wacana dan pembangunan digulirkan pemerintah perlu memperhatikan kualis hidup masyarakat dimasa mendatang, dimana kondisi sosial ketika pemerintah tidak kembali menempatkan masyarakat yang terkena dampak alih fungsi lahan ke tempat yang layak sebagaimana mestinya dikhawatirkan terjadi kesenjangan sosial di kalangan masyarakat, kesenjangan ini dirasa masyarakat seolah terkucilkan ditempat baru. Begitupun dengan kondisi ekonomi masyarakat akan berdampak pada kelayakan hidup masyarakat dimasa mendatang, dimana

mata pencaharian, pendapatan serta faktor-faktor lainnya perlu menjadi perhatian, bagaimanapun kualitas ekonomi sangat menentukan taraf hidup salah satu keluraga, kemampuan memberi nafkah serta aset-aset lainnya yang dimiliki saat sebelum ada alih fungsi lahan perlu kembali terpenuhi setelah adanya alih fungsi lahan. Peran pemerintah sangatlah membantu agar petani dapat memperoleh keahlian baru untuk dapat dijadikan sebagai pekerjaan baru atau setidaknya pemerintah menyiapkan lahan yang dapat digarap oleh petani.

Ketika kondisi sosial dan ekonomi belum dapat teratasi muncul kondisi budaya petani setelah alih fungsi lahan, tentunya penyesuaian kondisi budaya ini sangat ditopang oleh baiknya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Perubahan kondisi budaya akan terjadi bagaimana tingkat kehidupan mengalami perubahan seiring dengan dibangunnya bandara dan mulai diaktifkannya bandara tersebut, petani harus bisa beradaptasi dengan budaya yang baru, budaya yang tidak biasa dilakukannya dan diperolehnya saat di lingkungan masyarakat.

Berikut ini merupakan perbandingan tingkat kesejahteraan sebelum dan setelah alih fungsi lahan:

Tabel 33. Deskripsi Perbandingan Kelas Kesejahteraan Petani Sebelum dan Setelah Alih Fungsi Lahan

No.	Kelas Kesejahteraan	Jumlah		Presentase (%)	
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
1.	Pra Sejahtera	0	0	0	0
2.	Sejahtera 1	5	11	25,00	55,00
3.	Sejahtera 2	11	2	55,00	10,00
4.	Sejahtera 3	4	7	20,00	35,00
5.	Sejahtera 3 Plus	0	0	0	0
Total		20	20	100,00	100,00

Sumber : Analisis Data Primer, 2015

Berdasarkan tabel di atas terlihat jika adanya perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat sebelum dan setelah adanya alih fungsi lahan. Parameter yang dipakai adalah berdasarkan skala yang digunakan oleh BKKBN untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dimana terdapat poin-poin sebagai syarat terpenuhinya suatu masyarakat untuk masuk tingkat kesejahteraan tertentu.

Jika mengacu pada hasil yang diperoleh di lapang hasilnya petani di Desa Sukamulya sebelum adanya alih fungsi lahan dominan termasuk ke dalam tingkat kesejahteraan masyarakat tingkat 2 dengan tingkat persentase 55%. Hal ini terlihat dari kondisi rumah yang maih permanen dimana kondisi dinding, atap, lantai, dan lain-lain masih terlihat cukup baik atau permanen. Selain itu, dari intensitas makan dengan lauk yang kaya akan gizi relatif lebih sering atau punya porsi tertentu setiap minggunya, diikuti juga dengan tingkat konsumtif petani dalam membeli sandang untuk pemakaian sehari-hari. Jika di lihat dari pekerjaan petani atau anggota keluarga dengan umur lebih dari 15 tahun ke atas punya pekerjaan tetap dan penghasilan tetap. Untuk kegiatan rutinitas ibadah petani cenderung stabil dalam artian karena lingkungan masyarakat yang cukup dikenal serta kondisi yang masih tetap sama mengakibatkan rutinitas ibadah yang juga sama baiknya.

Untuk 45% sisanya relatif tidak berbeda jauh karena ada beberapa masyarakat yang masih berada pada tingkat kesejahteraan 1 sebanyak 25% dan tingkat kesejahteraan 3 sebanyak 20%. Jika dilihat berdasarkan parameter yang berada di tingkat kesejahteraan 1 biasanya petani dengan kepemilikan lahan sangat kecil dan beberapa diantaranya hanya berprofesi sebagai buruh tani. Hal ini terlihat dari kondisi rumah yang memang cukup sederhana dimana kondisi lantai hanya sebatas diplester, begitu pula dengan makan menu makan sehari-hari yang cukup sederhana dengan tidak tentunya makan lauk seperti ikan atau daging setiap minggunya, para petani yang berada di tingkatan ini tidak memiliki pekerjaan

tetap dengan pendapatan tetap, karena lahan yang dimiliki petani terbatas dan panen sewaktu-waktu biasanya petani mencari lahan garapan untuk ia bekerja disana sebagai buruh tani. Itupun jika memang ada tuan tanah besar yang memperkerjakannya. Dari rutinitas ibadah yang dilakukan termasuk biasa-biasa saja, faktor dari sulitnya ekonomi sedikit mempengaruhi rutinitas ibadah petani dengan tingkat kesejahteraan 1 di Desa Sukamulya, karena petani merasa jika ibdah bukanlah faktor utama untuk memperoleh penghasilan lebih. Namun begitu petani pada tingkatan ini relatif lebih baik di banding petani di tingkatan terendah, karena sudah tahu tempat berobat ketika salah satu anggota keluarganya sakit dan penggunaan pakaian sudah dapat menyesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan petani sehari-hari.

Petani yang berada di kasta ke 4 atau dengan tingkat kesejahteraan 3 biasanya petani dengan kepemilikan lahan pertanian yang cukup besar serta tingkat pendidikan yang lebih baik. Seperti contoh petani yang di wawancarai yakni pak Nono (54 tahun), ia merupakan seorang PNS yang memiliki luas lahan lebih dari 1ha, dimana kedua anaknya di pesantrenkan dan di sekolah kan hingga jenjang perguruan tinggi. Hal ini menandakan jika ia sadar akan pentingnya memperdalam ilmu agama dan pendidikan. Selain itu, ia memiliki tabungan pribadi untuk simpanan keluarga, tidak hanya ia saja melainkan kedua anaknya yang sekarang kuliah di perguruan tinggi dituntut untuk memiliki tabungan pribadi sebagai simpanan jika nantinya akan digunakan untuk keperluan pribadi atau keperluan kuliah.

Petani yang berada pada tingkatan ini juga memiliki kesadaran akan pentingnya berkumpul dengan keluarga yang ada di rumah, dan biasanya ia lakukan di meja makan dalam kegiatan makan bersama. Seperti halnya pak Nono yang cukup mejadi tokoh di desanya aktif juga di kegiatan masyarakat. Selain itu sadar akan pentingnya berita dengan selalu memanfaatkan waktu luangnnya untuk mencari tahu informasi atau berita terkini. Di samping itu, tidak luput sarana transportasi juga digunakan oleh petani pada tingkatan ini dimana semua anggota keluarga dapat memanfaatkan sarana transportasi yang dimiliki.

Setelah adanya alih fungsi lahan jelas terlihat adanya penurunan tingkat kesejahteraan petani. Berdasarkan data yang diperoleh di lapang keluarga petani

dengan tingkat kesejahteraan 1 berada pada peringkat pertama dengan total 55% atau sekitar 11 keluarga petani yang mengalami penurunan tingkat kesejahteraan, selanjutnya diikuti dengan petani yang berada di tingkat kesejahteraan 3 sebanyak 35% dan terakhir petani yang berada pada tingkat kesejahteraan 2 sebanyak 10%. Jarak ini terpaut cukup jauh sebesar 45% untuk tingkat kesejahteraan 1 ke tingkat kesejahteraan 2, hal ini disebabkan oleh harga jual tanah yang rendah karena tidak mengertinya petani tentang jual beli tanah sehingga petani begitu "legowo" untuk menjual tanahnya asalkan memperoleh bayaran. Selain itu faktor yang sangat berpengaruh lainnya adalah faktor mata pencaharian, menurunnya tingkat pendapatan petani diakibatkan semakin mengecilnya luas lahan garapan petani, tidak jarang beberapa diantaranya menjadi buruh tani karena tidak adanya lagi lahan yang bisa ia kelola. Sehingga banyak yang turun kasta dari tingkat kesejahteraan 2 ke tingkat kesejahteraan 1.

Perhatian lebih justru tertuju pada petani yang berada di tingkat kesejahteraan 3, padahal sebelum adanya alih fungsi lahan tingkat kesehateraan 3 hanya mencapai 20% sedangkan kini setelah adanya alih fungsi lahan justru meningkat dan berada di bawah petani yang berada di tingkat kesejahteraan 1 yakni sebesar 35%. Hal ini terjadi dikarenakan ada beberapa petani yang merasa dirugikan dengan adanya alih fungsi lahan tersebut, ia merasa jika uang hasil penjualan lahannya tidak cukup untuk bisa membeli lahan lagi di lain tempat dan untuk membangun rumah kembali. Petani yang kini berada pada tingkatan ini padahal sebelumnya bukan, dikarenakan ia membuka bisnis illegal dengan membangun rumah hantu dan dijual kembali kepada pemerintah sehingga memperoleh keuntungan kembali. Tetapi ada juga petani yang justru kini berada di tingkat kesejahteraan 3 dikarenakan meningkatnya pendapatan dan rutinitas ibadah petani karena kesolidan yang ditunjukkan oleh masyarakat Desa Sukamulya. Seperti yang ditunjukkan oleh Bapak Rush (36 tahun), ia memperoleh penghasilan lebih karena letak rumahnya di Desa Sukamulya sekarang cukup strategis dimana ia membuka toko kelontongan sederhana di daerah dimana petani atau masyarakat mudah memperolehnya. Sekalipun terdapat penurunan untuk kondisi rumahnya yang menjadi semi permanen, dan tanah bangunan rumah yang ada di Desa Sukamulya ia peroleh dari warisan orang tuanya.

Kondisi sosial ekonomi dan budaya petani erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, dimana kondisi sosial ekonomi dan budaya petani akan menentukan kelas tingkat kesejahteraan rumah tangga petani dalam standar BKKBN dan standar hidup dalam pandangan masyarakat. Ketika ketiga kondisi tersebut tinggi maka akan tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dimulai dari kondisi sosial merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan dimana dalam pengukuran kondisi sosial lebih mengarah pada keaktifan petani di lingkungan masyarakat, selain itu juga kemampuan memberi nafkah atau anggota keluarga yang bekerja akan dilihat secara pandangan kondisi sosial. Semakin baik kondisi sosial petani maka semakin baik juga tingkat kesejahteraan petani.

Kemudian pada bagian kondisi ekonomi lebih kepada aset yang dimiliki petani, dimana aset aset ini merupakan kekayaan petani tersebut jika dikonversikan dapat menghasilkan uang yang cukup besar, selain itu kondisi fisik rumah serta aset yang nampak lainnya mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat juga.

Terakhir kondisi budaya kaitannya dengan tingkat kesejahteraan adalah mengarah kepada rutinitas kebudayaan baik bahasa, agama, dan adopsi inovasi yang dapat dilakukan petani. Berikut ini merupakan hubungan antara kondisi sosial ekonomi dan budaya petani terhadap tingkat kesejahteraan:

Tabel 34. Hubungan Antara Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Petani Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Setelah Alih Fungsi Lahan

No	Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Petani Setelah Alih Fungsi Lahan	Jumlah (orang)	Tingkat Kesejahteraan (%)			rs_{hitung}
			1	2	3	
1.	Kondisi Sosial	20				0,17
	a. Kemampuan memberi nafkah	20	50,00	15,00	35,00	0,49*
	b. Keaktifan dalam organisasi	20	20,00	20,00	60,00	0,96**
	c. Keaktifan dalam donatur	20	10,00	25,00	65,00	0,58**
2.	Kondisi Ekonomi	20				0,20**

	a. Luas lahan	20	80,00	5,00	15,00	0,49*
	b. Hewan ternak	20	95,00	-	5,00	0,41
	c. Alat transportasi	20	5,00	80,00	15,00	0,43
	d. Alat komunikasi	20	5,00	-	95,00	0,35
	e. Keadaan rumah	20	15,00	65,00	10,00	0,49*
	f. Kondisi penerangan	20	-	-	100,00	-
	g. Sumber air	20	-	-	100,00	-
	h. Alat hiburan	20	-	5,00	95,00	0,22
	i. Frekuensi makan	20	-	35,00	65,00	0,14
	j. Kebutuhan pakaian	20	55,00	30,00	15,00	0,81**
	k. Pendapatan menurut pengalaman	20	55,00	5,00	40,00	0,63**
3. Kondisi Budaya		20				0,34**
	a. Rutinitas ibadah	20	-	40,00	60,00	0,19
	b. Penggunaan bahasa daerah	20	-	-	100,00	-
	c. Budaya dalam bertani	20	30,00	30,00	40,00	0,47*
	d. Adopsi inovasi dalam bertani	20	5,00	50,00	45,00	0,52*
Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya		20				0,79**

Sumber : Analisis data primer, 2015 (diolah)

* = Terdapat hubungan dengan tingkat signifikansi pada $R_{s0,05}$
** = Terdapat hubungan dengan tingkat signifikansi pada $R_{s0,01}$
1 = Sesuai dengan kriteria tingkat kesejahteraan 1
2 = Sesuai dengan kriteria tingkat kesejahteraan 2
3 = Sesuai dengan kriteria tingkat kesejahteraan 3

Berdasarkan data hubungan kondisi sosial ekonomi dan budaya petani terhadap tingkat kesejahteraan petani di atas menunjukkan jika ada hubungan keterkaitan antara beberapa variabel diantaranya pada kondisi sosial petani mengenai kemampuan memberi nafkah anggota keluarga petani menunjukkan ada hubungan dengan nilai probabilitas $R_{s0,05}$ dimana diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,49, ini menunjukkan tingginya kemampuan memberi nafkah anggota keluarga petani akan berdampak pada tingkat kesejahteraan petani dalam taraf tertentu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh BKKBN, begitupun dengan keaktifan dalam organisasi dan donatur $R_{s0,01}$ berarti tingkat kepercayaan 99% serta tingkat signifikansi masing-masing 0,96 dan 0,58 .

Pada bagian kondisi ekonomi terdapat beberapa variabel yang memiliki hubungan keterikatan terhadap tingkat kesejahteraan petani, dimulai dari luas lahan dan kondisi rumah yang dimiliki oleh petani, dimana diperoleh nilai probabilitas sebesar $R_{s0,05}$ dengan koefisien kolerasi sama yakni 0,49, semakin tinggi keterikatan antara luas lahan dan kondisi rumah dengan tingkat kesejahteraan semakin tinggi juga masyarakat dapat berada pada tahapan kesejahteraan tertentu. Lain halnya dengan faktor kebutuhan pakaian dan pendapatan menurut pengalaman dimana diperoleh nilai probabilitas $R_{s0,01}$ yang berarti memiliki tingkat kepercayaan 99% dan memiliki koefisien korelasinya secara berurutan masing-masing 0,80 dan 0,63. Kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan pakaian sangatlah diperlukan untuk dapat menunjang kebutuhan sekunder anggota keluarga lainnya sehingga dapat merubah kualitas hidup petani untuk dapat bertahan pada tingkat kesejahteraan tertentu. Selain itu, perlu ditunjang dengan pengalaman petani dalam memperoleh pendapatan dengan kemampuan yang dimilikinya, secara otomatis semakin berpengalamannya petani dan kreatifitasnya petani dalam memanfaatkan kesempatan dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan petani setelah alih fungsi lahan.

Terakhir untuk kondisi budaya petani setelah alih fungsi lahan terhadap tingkat kesejahteraan petani diperoleh dua faktor yang memeliki pengaruh dengan tingkat keterikatan $R_{s0,05}$ berada pada kepercayaan 95% terdapat pada budaya dalam bertani dengan signifikansi 0,47 dan adopsi inovasi dalam bertani dengan sig ni merupakan bagan keterikatat

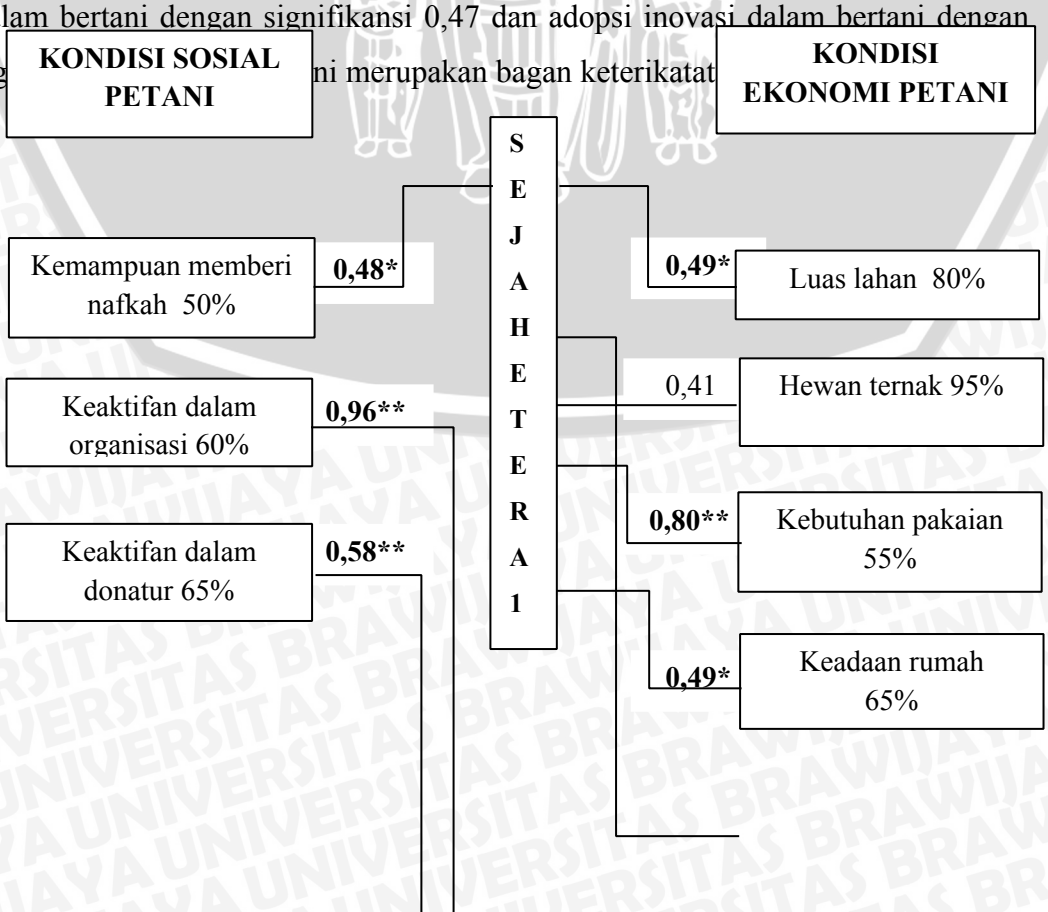

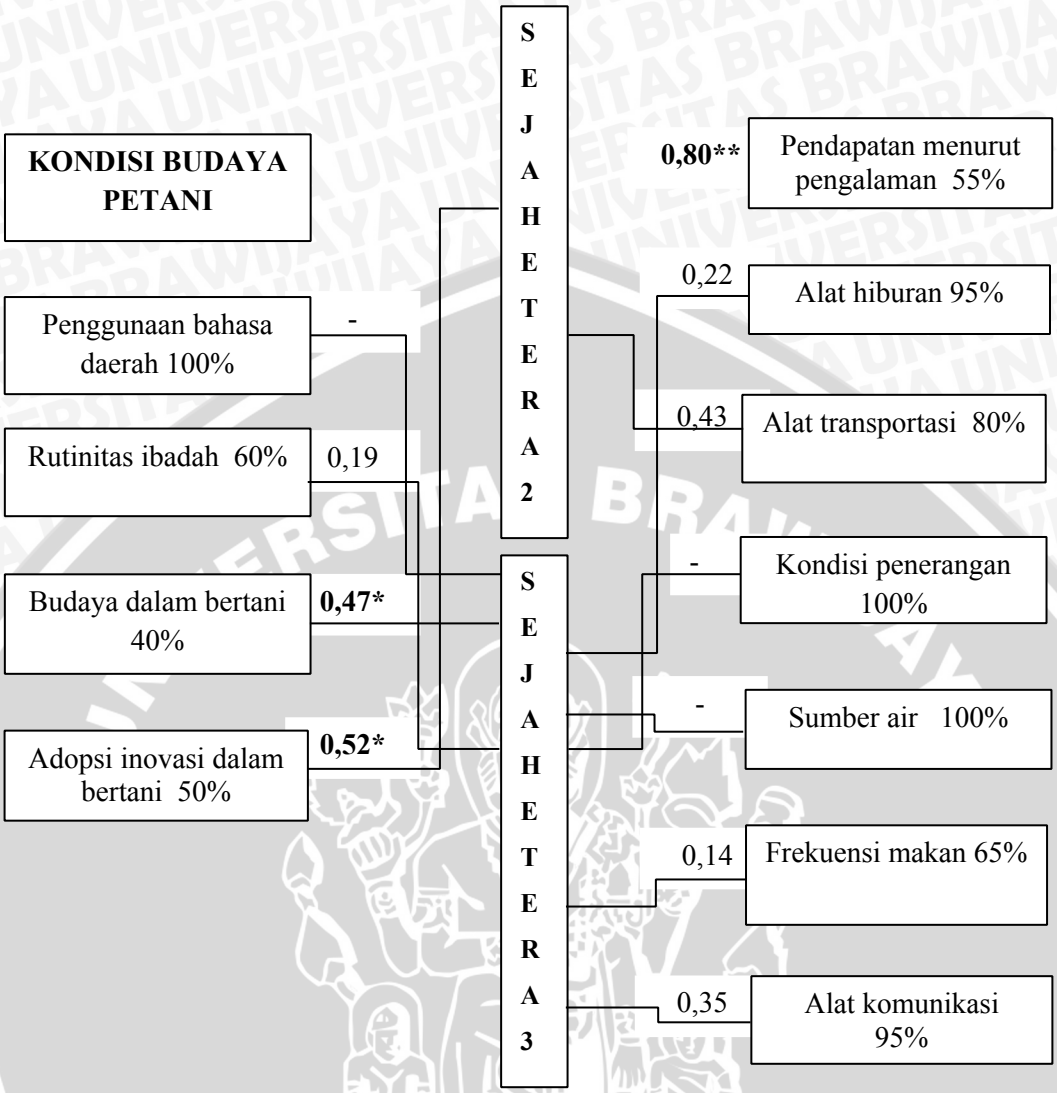

Gambar 9. Hubungan kondisi SOSEKBUD petani terhadap tingkat kesejahteraan petani setelah alih fungsi lahan

Berdasarkan data yang terdapat pada bagan di atas dapat disimpulkan jika tingkat hubungan yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani terdapat pada 7 faktor dengan tingkat signifikansi tertinggi ada pada faktor kebutuhan pakaian (0,802**), terendah ada pada faktor budaya dalam bertani (0,467*).Sedangkan faktor lainnya tidak berpengaruh terhadap perubahan tingkat kesejahteraan petani.Dalam tingkat kesejahteraan petani dibagi ke dalam 3 kelas yakni kelas kesejahteraan 1, kesejahteraan 2, dan kesejahteraan 3. Jika mengacu pada bagan di atas faktor yang memberi pengaruh pada tingkat kesejahteraan 1 yakni ada kemampuan memberi nafkah 50% untuk kondisi sosial dengan signifikansi (0,49*), 80% signifikansi (0,49*) dan 90% untuk kondisi ekonomi yang berkaitan

dengan luas lahan dan kepemilikan hewan ternak, lalu kebutuhan pakaian dan pendapatan menurut pengalaman sama 55% dengan keterikatan signifikan masing-masing (0,80**) dan (0,63**).

Pada kategori tingkat kesejahteraan 2 hanya ada 3 faktor saja dimana faktor tersebut memiliki pengaruh pada bagian ini, diantaranya ada kepemilikan alat transportasi sebesar 80% dan keadaan rumah setelah alih fungsi lahan sebesar 65% dengan tingkat hubungan signifikan sebesar (0,49*). Terakhir ada adopsi dan inovasi dalam bertani dengan presentase sebesar 50% dan tingkat keterikatan (0,52*).

Untuk kategori ketiga yakni dimana faktor-faktor tersebut cenderung memberikan pengaruh yang cukup besar pada kelas ini diantaranya dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: untuk kondisi sosial ada keaktifan dalam organisasi sebesar 60%, pun dengan keaktifan responden dalam memberikan donatur sebesar 65%. Untuk faktor kondisi ekonomi ada kepemilikan alat komunikasi sebesar 95%, 100% untuk kondisi penerangan dan sumber air, kepemilikan alat hiburan sebesar 95%, lalu frekuensi makan 65%. Pada kondisi budaya petani yang cenderung berpengaruh pada kelas ini ada mengenai rutinitas ibadah petani sebesar 60%, penggunaan bahasa daerah 100% dan terakhir ada budaya dalam bertani sebesar 40%.

Setelah adanya penjelasan di atas dengan tingkat kecenderungan pengaruh yang dibagi ke dalam tiga kelas kesejahteraan dapat diketahui jika tingkat keterikatan atau signifikasi hanya terdapat pada faktor-faktor tertentu saja.